



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendekatan pembangunan yang tengah dilakukan selama ini dianggap masih sangat bias gender dan belum mempertimbangkan manfaat dan dampak pembangunan yang sama bagi perempuan dan laki-laki. Hal itu memberikan kontribusi terhadap timbulnya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender.

Kondisi ini tentunya tidak selaras dengan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut GBHN 1999 yang bertekad akan meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui kebijakan nasional yang diimbangi oleh lembaga yang mampu memperjuangkan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. Penyetaraan juga diatur dalam UUD 1945, Undang-Undang, Instruksi Presiden dan aturan-aturan pelaksanaannya.

Salah satu strategi pembangunan dilakukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program, proyek dan kegiatan diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Guna mendukung strategi pembangunan tersebut diperlukan data statistik yang berwawasan gender dan gambaran peran perempuan diberbagai bidang kehidupan. Untuk itu, disusunlah Statistik dan Analisis Gender sebagai langkah awal dalam formulasi perencanaan pembangunan yang berwawasan gender.

1.2 Tujuan

Penyusunan buku ini bertujuan untuk menganalisa permasalahan gender secara menyeluruh yaitu mengidentifikasi kesenjangan gender, peran, akses, kontrol dan manfaat, mengetahui latar belakang terjadinya kesenjangan gender,



menghimpun masalah kesenjangan gender dan upaya pemecahannya serta mengidentifikasi langkah-langkah intervensi/tindakan yang diperlukan. Diharapkan dengan tersusunnya buku ini, pemerintah daerah dapat menentukan formulasi penetapan skala prioritas pembangunan kepada masyarakat terutama pembangunan yang berwawasan gender.

1.3 Sumber Data

Data yang mendukung Statistik dan Analisis Gender ini adalah data registrasi dari dinas instansi dan juga lembaga masyarakat tahun 2018, yang dilengkapi data-data dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional dan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional tahun 2018 baik berupa data kuantitatif maupun data kualitatif.

1.4 Sistematika Penulisan

Buku ini memuat bab-bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, menguraikan latar belakang, tujuan, sumber data dan sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Umum Daerah, memuat gambaran umum Kabupaten Rembang meliputi letak geografis, sejarah, sosial budaya dan perekonomian daerah.

Bab III Demografi, menyajikan gambaran penduduk meliputi karakteristik penduduk menurut jenis kelamin serta karakteristik penduduk menurut kelompok umur.

Bab IV Pendidikan, menyajikan gambaran tentang pendidikan penduduk meliputi angka buta huruf, partisipasi sekolah, pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan siswa putus sekolah.



Bab V Kesehatan, menyajikan gambaran kondisi kesehatan penduduk meliputi Imunisasi, Status Gizi, Angka Kematian bayi dan angka kematian anak serta kematian ibu.

Bab VI Kegiatan Ekonomi, menyajikan gambaran kondisi perekonomian meliputi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan pengangguran, lapangan dan status pekerjaan dan upah/gaji.

Bab VII Sektor Publik, menyajikan gambaran partisipasi perempuan di sektor publik yang meliputi partisipasi perempuan dalam bidang legislatif, eksekutif, yudikatif yang meliputi partisipasi perempuan dalam partai politik serta jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut eselonisasi berdasarkan jenis kelamin.

Bab VIII Kekerasan Terhadap Perempuan, menyajikan gambaran kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga.

Bab IX Indek Pembangunan Manusia (IPM), menyajikan perkembangan IPM, Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IPG).

Bab X Penutup

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI WILAYAH

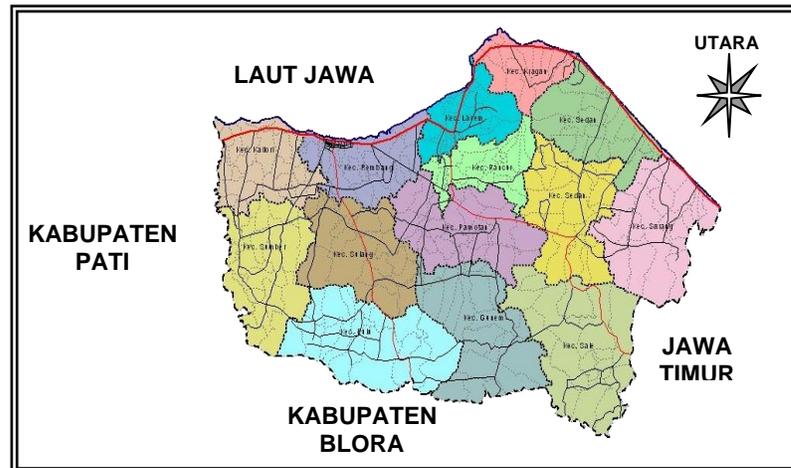
2.1. Kondisi Geografis Kabupaten Rembang

Wilayah Kabupaten Rembang terletak pada koordinat 111^o.00' – 111^o.30' Bujur Timur dan 6^o.30' – 7^o.60' Lintang Selatan dan diapit oleh batas – batas wilayah Sebelah Utara Laut Jawa, Sebelah Selatan Kabupaten Blora, Sebelah Barat Kabupaten Pati, Sebelah Timur Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur.

Kabupaten Rembang merupakan suatu wilayah yang sebagian besar merupakan daerah pantai yang membujur sepanjang pantai utara Jawa, kurang lebih 60 Km. Selain itu sebagian wilayah selatan masuk dalam wilayah administrasi Perhutani dengan komoditi utamanya hutan jati dan merupakan daerah pegunungan.

Ibukota Kabupaten Rembang terletak di Kecamatan Rembang dengan luas wilayah 101.408 Ha. Secara administratif Kabupaten Rembang terbagi dalam 14 Kecamatan dan terdiri dari 287 Desa dan 7 Kelurahan.

Gambar 2.1. Wilayah Kabupaten Rembang





Sebagian besar wilayah Kabupaten Rembang (63,04 %) berada pada ketinggian 0-100 meter diatas permukaan air laut. Sebesar 33,89 % berada pada ketinggian 101-500 meter dan hanya 3,07 yang berada di atas 500 m. Kondisi topografi di Kabupaten Rembang berelief datar, pegunungan dan berbukit-bukit dengan kemiringan lahan 0–2 % seluas 46,38 %, kemiringan 3–15 % seluas 34,35 %, kemiringan 16–40 % seluas 13,97 %, kemiringan lebih dari 40 % seluas 4,72% dari keseluruhan luas wilayah. Kondisi ini membuat wilayah Kabupaten Rembang beriklim tropis dengan curah hujan tertinggi pada bulan Desember sebesar 197 mm/bulan dan terendah pada bulan Juli sebesar 35 mm/bulan dan tersebar tidak merata.

Secara geologis, jenis tanah terbanyak yang terdapat di Kabupaten Rembang adalah tanah mediteran merah-kuning campur grumosol di bagian timur dari pantai sampai masuk ke selatan, dengan prosentase 45 %. Jenis tanah ini sesuai untuk sawah, tegalan dan lahan terbangun. Berbagai jenis tanah lainnya adalah tanah alluvial meliputi sekitar 10 %, tanah regosol meliputi area seluas 5 %, tanah andosol meliputi area seluas 8 %, tanah grumosol sebesar 32 %, dari seluruh luas wilayah kabupaten.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Rembang adalah berupa tanah kering yang terdiri dari tanah pekarangan/bangunan, tegalan, padang rumput, tambak, kolam, rawa, hutan, perkebunan, tanah kosong dan lainnya.

2.2. Sejarah Kabupaten Rembang

Sekitar Tahun Saka 1336, datanglah orang Campa Banjarmati sebanyak delapan orang yang pandai membuat gula tebu. Orang-orang Campa itu pindah dari negerinya untuk membuat gula tebu. Mereka dipimpin oleh Kakek Pow le Din, berangkat menyeberang lautan menuju ke barat hingga mendarat disekitar sungai dimana kanan kirinya ditumbuhi pohon bakau yang selanjutnya tanah itu



dijadikan pertegalan dan pekarangan serta perumahan dan perkampungan. Kampung tersebut dinamakan Kabongan berasal dari kata "BAKAU" menjadi "Ka-Bong-An" (Kabongan). Pada suatu hari saat fajar menyising pada bulan waisaka orang-orang mulai "Ngerembang" (mbabat; memangkas) tebu. Sebelum ngerembang tebu dimulai terlebih dahulu upacara suci sembahyang dan semedi di tempat tebu serumpun, yang akan dipangkas, setelah itu dipangkaslah dua batang tebu yang dinamakan "Tebu Pengantin". Upacara pemangkas tebu tersebut dinamakan "Ngreembang Sakawit" .

Dari kata ngreembang inilah kemudian menjadi kata "Rembang" nama kota Rembang yang sekarang ini. Menurut sahibul hikayat dengan nama samaran mbah guru, upacara "Ngreembang sakawit" dilaksanakan pada hari Rabo legi, saat dinyanyikan kidung minggu Kasada bulan Waisaka tahun Saka 1337 dengan candra sengkala : Sabda Tiga Wadha Isvara.

Rembang sudah dikenal sebagai daerah pelabuhan dan salah satu pusat pembuatan kapal pada masa kerajaan Demak. Sebelum abad ke 17 pada umumnya wilayah-wilayah di pantai utara Jawa Tengah terdiri dari kadipaten-kadipaten yang diperintah oleh seorang adipati/bupati. Kekuasaan-kekuasaan terhadap wilayah kadipaten/kabupaten inipun akan turun menurun kepada adipati/bupati berikutnya yang sering masih turunan bupati sebelumnya.

Namun semenjak makin melemahnya kekuasaan raja Mataram dan pengaruh VOC (serikat dagang dari Belanda) yang semakin kuat, serikat dagang ini sering mempengaruhi proses suksesi penguasa-penguasa kabupaten-kabupaten di Jawa, khususnya pantai utara Jawa. Oleh karena itu sering terjadi beberapa kadipaten diperintah oleh bupati yang diangkat oleh VOC demi mengamankan kepentingannya. Sering adipati-adipati itu bukan dari keturunan adipati lokal sebelumnya melainkan dari luar kabupaten. Pengaruh ini menjadi semakin besar ketika pada tahun 1677 VOC mendapatkan imbalan dari



raja Amangkurat II atas keberhasilannya membantu kerajaan Mataram memadamkan perlawanan Trunajaya. Atas keberhasilannya membantu menumpas perlawanan Trunajaya tersebut, maka VOC mendapatkan imbalan sebagai berikut :

- VOC mengakui Amangkurat II sebagai raja Mataram
- VOC boleh berdagang dengan bebas di wilayah kerajaan Mataram dan membuat pelabuhan di Rembang
- Pemasukan barang-barang VOC ke Mataram tidak dikenakan cukai
- Karawang dan sebagian Priangan diserahkan kepada VOC
- Kota Semarang diberikan kepada VOC
- Pantai-pantai di seluruh Jawa digadaikan kepada VOC dan ongkos perang dibayar oleh Amangkurat II.

Merujuk buku Carita (sejarah) Lasem pada awal abad ke 18 pada dasarnya Kabupaten Rembang telah berada di bawah pengaruh kekuasaan VOC. Di Kabupaten Rembang (Khuta Rembang) VOC tidak hanya memiliki seorang bupati yang setia tetapi juga sejumlah pasukan dan markas tentara (tangsi). Tangsi VOC ini berada di Karanggeneng menghadap Teluk Cepluk (kemungkinan Muara kali Karanggeneng sekarang). Bahkan Kabupaten Rembang merupakan satu titik kepanjangan tangan kekuatan VOC di Jepara dan Semarang untuk mengawasi kabupaten Lasem yang berada di sebelah timurnya. Pengaruh itu semakin kuat ketika pada tahun 1743, Rembang menjadi salah satu wilayah yang diserahkan oleh Mataram kepada VOC, termasuk hak mengangkat pejabat administrasi setempat.

2.3. Kondisi Sosial Budaya Kabupaten Rembang

Sebagai daerah yang memiliki pantai, daratan, hutan dan pegunungan, penduduk Kabupaten Rembang memiliki beraneka ragam mata pencaharian.



Lapangan pekerjaan yang menyerap paling banyak tenaga kerja adalah di bidang pertanian, kehutanan, perburuhan dan perikanan dengan tingkat pendapatan yang relatif rendah apabila dibandingkan dengan semakin besarnya kebutuhan pokok. Kabupaten Rembang masih menghadapi masalah yang cukup pelik dibidang sosial dimana terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin baik di wilayah perkotaan maupun di wilayah pedesaan. Penduduk miskin ini dapat memancing permasalahan rawan sosial dimana salah satu diantaranya adalah meningkatnya angka kriminalitas.

Peningkatan jumlah penduduk miskin yang sangat besar justru terjadi di wilayah pedesaan. Rendahnya tingkat ekonomi menyebabkan rendahnya posisi tawar dalam berbagai aktivitas pembangunan masyarakat, masyarakat inipun menjadi semakin terpinggirkan. Kegiatan organisasi yang berbasis kemasyarakatan, inovasi masyarakat dalam upaya meningkatkan kegiatan usaha dan ketrampilan sebagai penggerak ekonomi juga menjadi jauh dari jangkauan. Organisasi berbasis kemasyarakatan yang ada, yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat banyak justru didominasi oleh pemimpin informal dan juragan di desa, masyarakat umum dan buruh justru kurang berperan aktif dalam kegiatan yang sebenarnya sangat bermanfaat bagi mereka. Sebagaimana tangga kebutuhan Maslow, kebutuhan dasarlah yang masih menjadi prioritas bagi golongan masyarakat berpenghasilan rendah tersebut.



BAB III DEMOGRAFI

Data demografi (kependudukan) merupakan data pokok yang dibutuhkan oleh konsumen baik pemerintah maupun swasta sebagai bahan untuk perencanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan. Hampir setiap aspek perencanaan pembangunan baik di bidang sosial, ekonomi maupun politik memerlukan data penduduk, karena penduduk merupakan subjek sekaligus objek dari pembangunan. Penduduk di Kabupaten Rembang dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan, namun demikian peningkatannya tidak signifikan karena pertumbuhan penduduknya dalam tiga tahun terakhir sedikit mengalami kenaikan. Hal ini bisa dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1. Penduduk Kabupaten Rembang Dirinci Menurut Jenis Kelamin Tahun 2014 – 2018

Tahun	Perempuan	Laki-laki	Jumlah	Sex Ratio	Pertumbuhan
1	2	3	4	5	6
2014	309.897	307.004	616.901	99,07	0,88
2015	311.570	309.564	621.134	99,36	0,69
2016	314.079	312.057	626.136	99,36	0,81
2017	316.705	314.180	630.885	99,20	0,76
2018	319.170	316.626	635.976	99,20	0,80

Sumber : BPS Kabupaten Rembang Tahun 2014 - 2018

3.1 Karakteristik Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Perbandingan jumlah penduduk perempuan dengan laki-laki selama lima tahun terakhir di Kabupaten Rembang menunjukkan bahwa penduduk perempuan lebih banyak dari pada laki-laki. Pada tahun 2018, rasio jenis kelaminnya (sex ratio) sebesar 99,20 yang berarti bahwa setiap 10.000 penduduk perempuan terdapat 9.920 penduduk laki-laki.



Dari tabel 3.1 terlihat angka rasio jenis kelamin selama lima tahun terakhir mendekati hampir 100 sehingga dapat disimpulkan bahwa penduduk laki-laki di Kabupaten Rembang hampir berimbang jika dibandingkan dengan penduduk perempuan.

3.2 Karakteristik Penduduk Menurut Kelompok Umur

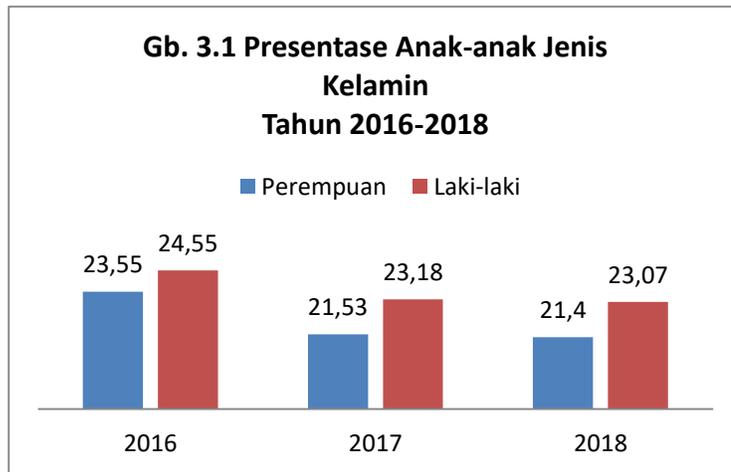
Komposisi penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Rembang disajikan dalam tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2. Distribusi Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2018 (persen)

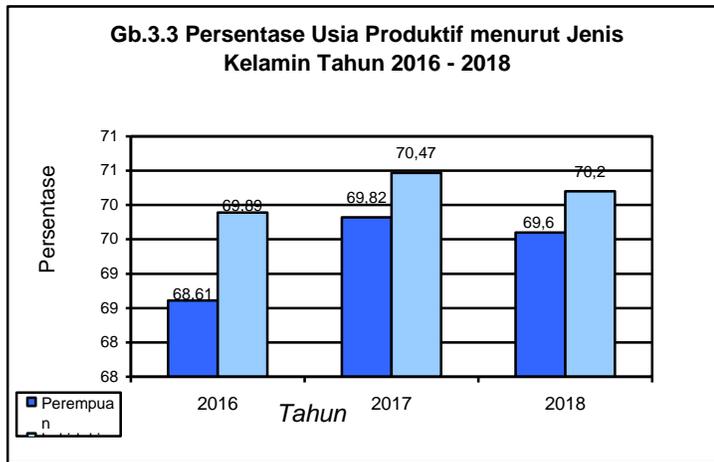
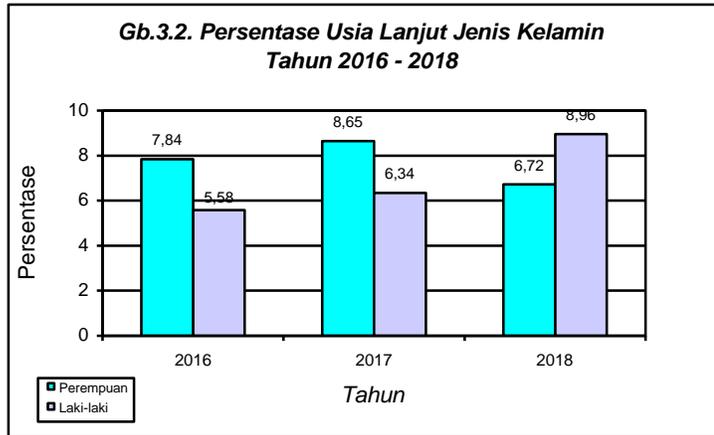
Klmpk Umur	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018	
	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki
1	2	3	4	5	6	7
0 - 4	7,45	9,01	6,86	7,41	7,27	6,77
5 - 9	7,05	6,63	7,39	7,92	7,78	7,19
10 - 14	9,05	8,90	7,27	7,85	8,02	7,46
15 - 19	6,50	7,82	8,17	8,74	8,35	7,77
20 - 24	7,39	7,39	8,01	8,65	8,63	8,02
25 - 29	7,92	8,45	7,32	7,34	7,76	7,52
30 - 34	6,57	6,36	7,73	7,45	7,14	7,32
35 - 39	9,01	8,61	7,59	7,34	7,30	7,62
40 - 44	8,22	7,50	7,44	7,24	7,28	7,44
45 - 49	6,66	6,97	7,39	7,21	7,02	7,20
50 - 54	5,90	7,06	6,89	6,62	6,67	6,80
55 - 59	6,17	5,15	5,48	5,78	5,78	5,78
60 - 64	4,28	4,57	3,81	4,11	4,23	4,08
65 +	7,84	5,58	8,65	6,34	6,72	8,96
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Diolah dari data Susenas tahun 2016 - 2018

Berdasarkan penggolongan kelompok umur penduduk di atas, maka dapat dihitung besarnya angka beban tanggungan, yaitu perbandingan penduduk yang berumur 0 -14 tahun dan di atas 65 tahun (usia tidak produktif) dengan penduduk yang berumur 15 – 64 tahun (usia produktif). Dari tabel 3.2 setelah dihitung menunjukkan bahwa Kabupaten Rembang pada tahun 2018 angka beban tanggungan sebesar 43,68 persen untuk penduduk perempuan dan 42,45 persen untuk penduduk laki-laki.



Pada tahun 2016 sampai 2018 persentase penduduk di bawah 15 tahun (anak-anak) perempuan lebih kecil jika dibandingkan anak laki-laki, hal ini bisa dilihat pada gambar 3.1.



Pada tiga tahun terakhir persentase perempuan diatas 65 tahun (lanjut usia) lebih besar dibandingkan laki-laki, hal ini bisa dilihat pada gambar 3.2. Sedangkan pada gambar 3.3 dapat dilihat untuk usia produktif (15–64 tahun) pada tahun 2018 persentase laki-laki dan perempuan mengalami penurunann dibandingkan tahun 2017.



3.3 Karakteristik Penduduk Menurut Status Perkawinan

Dalam tiga tahun terakhir status perkawinan penduduk Kabupaten Rembang yang berumur 10 tahun ke atas dapat dilihat pada table 3.3 di bawah. Dari tabel tersebut terlihat bahwa perempuan yang bercerai (baik cerai hidup maupun cerai mati) persentasenya lebih tinggi bila dibandingkan dengan laki-laki.

Data Dindukcapil tahun 2018 menunjukkan bahwa persentase penduduk perempuan yang belum kawin mengalami peningkatan dari 20,53 persen tahun 2017, menjadi 32,58 persen tahun 2018. Penduduk perempuan yang berstatus cerai hidup lebih tinggi dibanding laki-laki. Hal ini kemungkinan disebabkan karena laki-laki lebih cepat untuk memutuskan kawin lagi dari pada perempuan. Dapat pula dilihat pada tahun 2018 secara umum perempuan yang pernah kawin sebesar 67,41 persen dan laki-laki 57,15 persen, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya baik laki-laki maupun perempuan mengalami sedikit penurunan.

Tabel 3.3. Persentase Penduduk Berumur 10 tahun ke atas Menurut Status Perkawinan di Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2018

Status Perkawinan	Jenis Kelamin	Tahun		
		2016	2017	2018
1	2	4	5	
Belum kawin	Perempuan	19,02	20,53	32,58
	Laki-laki	31,85	32,49	42,84
Kawin	Perempuan	65,13	64,48	55,95
	Laki-laki	64,57	63,22	54,41
Cerai Hidup	Perempuan	2,62	2,05	2,02
	Laki-laki	0,76	1,28	1,04
Cerai Mati	Perempuan	13,23	12,94	9,44
	Laki-laki	2,82	3,01	1,70

Sumber : Data DINDUKCAPIL Tahun 2016-2018



3.4 Karakteristik Penduduk Menurut Formasi Kepala Rumah tangga

Salah satu kondisi yang menunjukkan kemandirian perempuan adalah fungsi perempuan sebagai kepala rumahtangga. Kondisi ini sekaligus juga menaikkan posisi tawar mereka (*bargaining position*) dalam pengambilan keputusan dalam suatu keluarga.

Dari tabel 3.4 di atas terlihat pada tahun 2018 sebagian besar rumahtangga masih dikepalai oleh laki-laki, sebesar 16,42 persen rumah tangga di kepalai oleh perempuan artinya setiap 100 rumah tangga dikepalai oleh sekitar 16 orang perempuan dan sekitar 84 dikepalai oleh laki-laki. Masih adanya perempuan sebagai kepala rumahtangga dimungkinkan karena banyak perempuan muda yang bekerja membentuk rumahtangga tunggal (*single head household*) atau perempuan yang berstatus janda ditinggal cerai (hidup/mati).

Tabel 3.4. Persentase Kepala Rumah tangga Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Rembang Tahun 2016 - 2018

Jenis Kelamin	Tahun		
	2016	2017	2018
1	3	4	5
Perempuan	12,34	14,08	16,42
Laki-laki	87,66	85,92	83,58
JUMLAH	100,00	100,00	100,00

Sumber : DATA DINDUKAPIL tahun 2016 - 2018

Dari tabel 3.5 di bawah ini terlihat pada tahun 2018 pada umumnya perempuan yang menjadi kepala rumahtangga berstatus janda (cerai hidup atau cerai mati) yaitu sebesar 86,73 persen dan yang belum kawin sebesar 2,57 persen.



Tabel 3.5 Persentase Kepala Rumahtangga Perempuan Menurut Status Perkawinan Kabupaten Rembang Tahun 2016 - 2018

Status Perkawinan	Tahun		
	2016	2017	2018
1	3	4	
1. Belum Kawin	2,12	3,05	2,57
2. Kawin	7,69	9,51	10,70
3. Cerai Hidup	12,42	14,17	15,03
4. Cerai Mati	77,76	73,27	71,70

Sumber : Data DINDUKAPIL Tahun 2016 – 2018

3.5 Karakteristik Penduduk Menurut Pola Perkawinan

Umur perkawinan pertama perempuan pernah kawin akan berpengaruh terhadap tingkat kelahiran, yang secara tidak langsung juga akan berpengaruh pada partisipasi masyarakat dalam ber KB. Disamping itu umur perkawinan pertama perempuan juga merupakan salah satu tolok ukur kesehatan perempuan pada saat hamil dan melahirkan. Semakin muda umur perkawinan pertama, semakin besar resiko yang dihadapi bagi keselamatan ibu maupun anak pada saat hamil ataupun saat melahirkan. Begitu juga sebaliknya semakin tua umur perkawinan pertama semakin besar pula resiko pada saat hamil dan saat melahirkan.

Hal lain yang tidak kalah pentingnya harus juga di perhatikan adalah jarak kelahiran anak dan jumlah anak yang dilahirkan. Jarak kelahiran anak yang terlalu dekat akan juga berpengaruh pada kondisi kesehatan ibu, mengingat alat reproduksi yang sebetulnya belum siap untuk dibuahi karena masih dalam proses pemulihan sudah harus menerima beban lagi dengan adanya janin didalamnya.



Tabel 3.6 Data Usia Kawin Berumur 10 tahun ke atas Menurut Umur Perkawinan di Kabupaten Rembang Tahun 2016 - 2018

Umur Perkawinan	Tahun					
	2016		2017		2018	
	L	P	L	P	L	p
10 – 16		35		31		27
17 – 18	18	1514	23	1220	16	1407
19 – 25	2166	2228	1853	2020	2379	2777
26 – 30	1706	695	1494	642	1866	771
31 +	1183	545	1223	680	1449	755

Sumber : Diolah dari data Kementerian Agama Kab Rembang 2018

Dari tabel 3.6 terlihat bahwa pada tahun 2018 masih ada perempuan yang melangsungkan perkawinan pertama pada usia sangat muda , 10–16 tahun sebesar 0,47 persen dan usia 17–18 tahun 24,52 persen. Hal ini menunjukkan penurunan perkawinan muda yang berumur 10-16 tahun bila dibandingkan dengan angka pada tahun 2017 yaitu sebesar 0,67 persen sedangkan usia 17-18 mengalami juga mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2017 sebesar 26,56 persen. Gambaran tersebut sangat memprihatinkan karena masih banyak perempuan di Kabupaten Rembang yang menikah di bawah umur. Perkawinan dini sangat beresiko pada kesehatan ibu dan anak.

Disamping usia perkawinan yang sangat berpengaruh pada kesehatan ibu dan anak, beban kerja yang sangat berat bagi perempuan dan kondisi ekonomi yang sangat minim dalam keluarga tersebut tentunya juga sangat mempengaruhi.



BAB IV PENDIDIKAN

Pendidikan sangat berperan dalam membentuk baik atau buruknya pribadi manusia menurut ukuran normatif. Oleh karena itu pemerintah sangat serius menangani bidang pendidikan sebab dengan sistem pendidikan yang baik diharapkan muncul generasi penerus bangsa yang berkualitas dan mampu menyesuaikan diri untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Salah satu program pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah program pendidikan gratis pada tingkat dasar di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu upaya lainnya dengan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan.

Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan Fasilitas pendidikan dapat dilihat dari penduduk menurut kategori partisipasi sekolah. Berdasarkan partisipasi sekolah, penduduk dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu tidak/belum pernah sekolah, masih sekolah dan tidak bersekolah lagi. Masih sekolah adalah mereka yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan baik di suatu jenjang pendidikan formal (pendidikan dasar yaitu SD/MI dan SMP/MTs, pendidikan Menengah seperti SMA/SMK/MA dan pendidikan tinggi yaitu PT) maupun pendidikan non formal (Paket A/setara SD, Paket B/setara SMP dan Paket C/setara SMA) yang berada di bawah pengawasan Kemendikbud, Kemenag, Instansi Lain maupun Instansi swasta.



**Tabel 4.1 Presentase Penduduk Usian 5 Tahun ke Atas Menurut Tipe Daerah,
Jenis Kelamin dan Partisipasi Sekolah Tahun 2018**

TIPE DAERAH/ JENIS KELAMIN	PARTISIPASI SEKOLAH			
	Tidak/ Belum Pernah Sekolah	Masih Sekolah	Tidak Bersekolah Lagi	Jumlah
1	2	3	4	5
Perkotaan				
Laki-laki	3,46	24,20	72,34	100,00
Perempuan	4,83	23,05	72,12	100,00
Laki –laki + Perempuan	4,14	23,63	72,73	100,00
Pedesaan				
Laki-laki	5,07	19,93	75,00	100,00
Perempuan	10,10	17,55	72,35	100,00
Laki –laki + Perempuan	7,61	18,73	73,66	100,00
Perkotaan + Pedesaan				
Laki-laki	4,52	21,38	74,10	100,00
Perempuan	8,33	19,39	72,28	100,00
Laki –laki + Perempuan	6,44	20,38	73,18	100,00

Sumber : Data Profil Pendidikan Tahun 2018

Pada tabel 4.1 di atas menunjukkan bahwa persentase penduduk Rembang usia 5 tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah sebesar 6,44 persen, penduduk yang masih sekolah sebesar 20,38 persen dan penduduk yang sudah tidak bersekolah lagi 73,18 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat penduduk Rembang usia 5 tahun ke atas yang belum/tidak menikmati pendidikan.



Menurut daerah tempat tinggal, persentase penduduk Rembang usia 5 tahun ke atas yang tidak/belum pernah bersekolah di daerah pedesaan 7,61 persen lebih tinggi daripada penduduk yang tinggal di perkotaan yaitu 4,14 persen. Hal ini disebabkan akses pendidikan penduduk di daerah perkotaan jauh lebih baik jika dibandingkan dengan yang tinggal di pedesaan, dan juga masalah ketersediaan fasilitas pendidikan di perkotaan jauh lebih lengkap dan lebih memadai jika dibandingkan dengan di pedesaan.

Sementara persentase penduduk Rembang usia 5 tahun ke atas yang masih sekolah di daerah perkotaan 23,63 persen relatif lebih tinggi jika dibandingkan di daerah pedesaan yaitu 18,73 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kesempatan belajar masih didominasi oleh penduduk yang tinggal di kota. Penduduk di pedesaan terkadang punya anggapan bahwa 'sekolah tidak perlu tinggi-tinggi' terutama untuk penduduk perempuan. Sedangkan persentase penduduk Rembang usia 5 tahun ke atas yang tidak bersekolah lagi di pedesaan 73,66 persen lebih tinggi daripada di perkotaan 72,73 persen.

4.1 Angka Melek Huruf

Melek Huruf adalah kemampuan membaca dan menulis yaitu merupakan kemampuan dasar/minimal yang harus dimiliki seseorang untuk dapat memperoleh ilmu pengetahuan. Membaca informasi dari berbagai sumber dapat membuka wawasan dan menyampaikan informasi tersebut dalam bentuk tulisan merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dalam proses pembelajaran.

Hal tersebutlah yang menjadikan indikator melek huruf sebagai indikator paling esensial di antara indikator pembangunan manusia yang lain. Demikian pentingnya indikator ini untuk mengukur dimensi



pengetahuan, maka Pemerintah Kabupaten Rembang terus mengupayakan program pemberantasan buta aksara khususnya di daerah-daerah yang masih tertinggal.

Angka melek huruf merupakan salah satu variabel dalam menentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI).

Tabel 4.2 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Kelompok Umur 2018

TIPE DAERAH/ JENIS KELAMIN	KELOMPOK UMUR			
	15 +	15-24	25-44	45 +
1	2	3	4	5
Perkotaan				
Laki-laki	98,62	100,00	99,55	97,17
Perempuan	93,45	100,00	99,77	84,83
Laki –laki + Perempuan	96,01	100,00	99,66	90,75
Pedesaan				
Laki-laki	96,68	98,95	99,69	92,52
Perempuan	91,49	100,00	100,00	79,54
Laki –laki + Perempuan	94,05	99,46	99,85	85,76
Perkotaan + Pedesaan				
Laki-laki	97,34	99,30	99,30	94,08
Perempuan	92,15	100,00	99,31	81,30
Laki –laki + Perempuan	94,70	99,64	99,30	87,43

Sumber : Data Profil Pendidikan Tahun 2018

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, kondisi keaksaraan Kabupaten Rembang terlihat bahwa melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas menurut jenis kelamin, secara umum laki-laki lebih tinggi dibandingkan



perempuan. Kalau dilihat dari sisi gender (tabel 4.2), persentase penduduk perempuan melek huruf umur 15 tahun ke atas tahun 2018 sebesar 92,15 persen, lebih rendah dibandingkan penduduk laki-laki sebesar 97,34 persen. Apabila dilihat menurut kelompok umur antara laki-laki dan perempuan, semakin tinggi kelompok umur semakin besar perbedaan capaian melek huruf antara laki-laki dan perempuan. Capaian melek huruf laki-laki mulai kelompok umur 15-24 tahun hingga 25-44 tahun di atas 90 persen bahkan untuk kelompok usia 15-24 tahun angka sudah mencapai 100 persen baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan pada perempuan pada usia 45 tahun ke atas rata-rata dibawah 90 persen. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa penduduk perempuan yang buta huruf lebih banyak dibanding penduduk laki-laki terutama pada kelompok usia 45 tahun ke atas. Artinya bahwa pendidikan perempuan di Kabupaten Rembang masih rendah dibandingkan dengan tingkat pendidikan laki-laki. Untuk itu, salah satu upaya penting mengejar ketertinggalan perempuan di berbagai bidang adalah dengan terus membangun kesetaraan dalam bidang pendidikan. Dilihat menurut tipe daerah, persentase penduduk melek huruf umur 15 tahun ke atas di daerah perdesaan sebesar 94,05 persen, lebih rendah dibandingkan daerah perkotaan sebesar 96,01 persen. Kondisi yang sama terjadi pada kelompok umur lainnya dimana persentase penduduk yang melek huruf di perdesaan lebih rendah dibandingkan di perkotaan. Hal ini disebabkan di daerah perkotaan lebih banyak tersedia fasilitas pendidikan dibandingkan daerah



perdesaan. Kondisi tersebut terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan dan hampir di semua kelompok umur.

4.2 Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah Kasar (APSK) dan Angka Partisipasi Sekolah Murni (APSM) baik di tingkat SD/MI, SMP/MTs, maupun SMA/MA/SMK merupakan salah satu indikator tentang keberhasilan pemerintah dalam bidang peningkatan pelayanan pendidikan.

Di Kabupaten Rembang angka partisipasi sekolah dari tahun ke tahun semakin meningkat sejak tahun 2006. Peningkatan ini terjadi karena semakin besarnya komitmen Pemerintah Daerah dalam bidang pendidikan. Program-program pemerintah yang strategis ini dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat dalam menikmati layanan pendidikan yang dibutuhkan, sehingga anak-anak usia sekolah dapat bersekolah sesuai dengan layanan yang diberikan.

Program strategis itu antara lain, Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SD/MI dan SMP/MTs., dan Program Sekolah Gratis di Kabupaten Rembang pada jenjang Pendidikan Dasar. Kenaikan angka partisipasi ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:



Tabel 4.3. Persentase Angka Partisipasi Sekolah Murni (APSM) Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2016 – 2018

No.	Pendidikan	2016	2017	2018
1.	SD			
	Perempuan	100,00	97,37	97,04
	Laki-laki	99,08	98,23	96,48
	TOTAL	99,54	97,82	96,75
2.	SMP			
	Perempuan	86,21	89,44	81,49
	Laki-laki	81,69	79,08	82,17
	TOTAL	84,21	83,81	81,84
3.	SMA			
	Perempuan	46,76	56,53	59,34
	Laki-laki	53,28	52,18	54,31
	TOTAL	50,40	54,27	56,67

Sumber : Data Dinas Pendidikan Tahun 2016 – 2018

Dari tabel 4.3 tersebut dapat dilihat bahwa angka partisipasi sekolah murni anak usia SD selama tiga tahun terakhir mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena semakin besar komitmen pemerintah daerah dalam bidang pendidikan serta kesadaran masyarakat yang semakin tinggi untuk mendapatkan pendidikan tingkat dasar. Pada jenjang SMP angka partisipasi sekolah murni pada tahun 2018 mengalami penurunan sedangkan pada jenjang SMA angka partisipasi murni tahun 2018 mengalami peningkatan.

4.3 Siswa Putus Sekolah

Permasalahan-permasalahan sebagai kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam rangka pemberian pelayanan pendidikan kepada masyarakat adalah sangat beragam. Kebijakan yang sangat penting dalam mengatasi permasalahan bidang pendidikan adalah bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam bidang pendidikan. Jika dorongan dari orang tua untuk menyekolahkan anaknya kurang, maka



kemungkinan yang timbul adalah anak sekolah dropout. Penyebab lainnya adalah faktor ekonomi masyarakat khususnya di daerah pedesaan juga sangat mempengaruhi. Semakin rendah tingkat ekonomi masyarakat, maka semakin besar resiko dropout bagi anak-anaknya, meskipun program sekolah gratis telah dilaksanakan, tetapi kebutuhan dasar anak sekolah berupa biaya tidak langsung, misalnya transport ke sekolah, pembelian alat-alat tulis, seragam, sepatu, tas, dan pengembangan diri berupa les dan lain lain, yang masih dianggap berat. Sedangkan bantuan beasiswa masih sangat terbatas jumlah yang disalurkan.

Dengan kesadaran masyarakat sehingga baik perempuan maupun laki-laki memperoleh pendidikan yang setara sehingga yang putus sekolah antara perempuan dan laki-laki diharapkan seimbang, namun di Kabupaten Rembang kondisi anak-anak usia sekolah SD, SLTP dan SLTA yang mengalami putus sekolah cenderung lebih banyak laki-laki dibanding perempuan (Tabel. 4,4) Berbagai faktor internal yang dapat menyebabkan anak putus sekolah seperti desakan ekonomi keluarga, broken home, malas atau kurang berminatnya anak untuk bersekolah. Sedangkan faktor eksternal yang dapat menjadi penyebab anak putus sekolah yaitu karena faktor geografis, pandangan masyarakat tentang pendidikan itu sendiri dan kondisi lingkungan tempat tinggal anak. Akibat dari kasus putus sekolah ini tentu akan menimbulkan dampak- dampak pada anak itu sendiri, seperti terbatasnya wawasan atau pengetahuan pada anak, menciptakan pengangguran, menimbulkan kenakalan remaja. Usia anak remaja laki-laki lebih mudah terpengaruh dengan lingkungan sekitar, banyak yang salah pergaulan dan ada yang memilih bekerja dari pada sekolah.



Tabel 4.4 Banyaknya Siswa Putus Sekolah di Kabupaten Rembang Tahun 2018

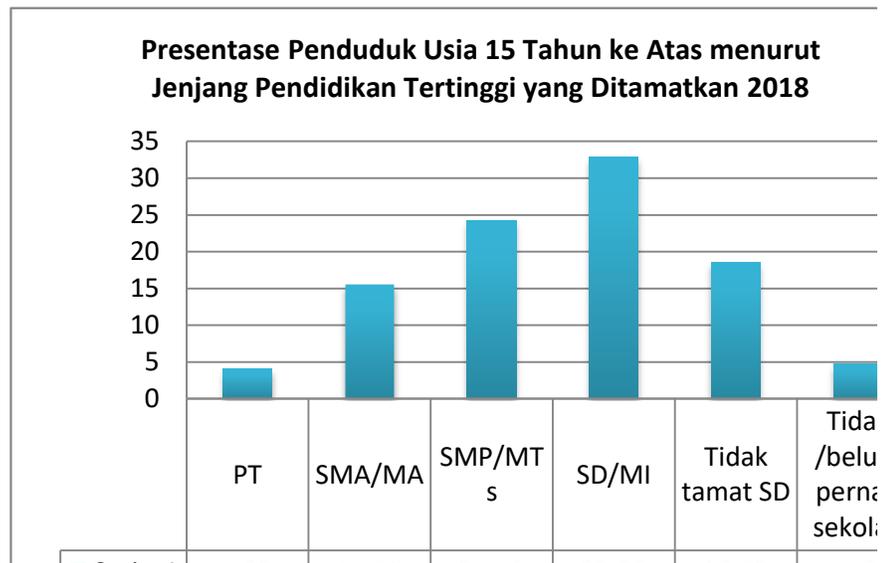
No.	Kelompok Usia	Negeri	Swasta	Jumlah
1.	Siswa SD			
	Perempuan	5	-	5
	Laki-laki	7	-	7
	TOTAL	12	-	12
2.	Siswa SMP			
	Perempuan	17	3	20
	Laki-laki	77	7	84
	TOTAL	94	10	104
3.	Siswa SMA			
	Perempuan	28	15	43
	Laki-laki	110	22	132
	TOTAL	138	37	175

Sumber : diolah dari data Dinas Pendidikan Rembang

4.4 Pendidikan Tinggi Yang Ditamatkan

Salah satu indikator untuk melihat kualitas sumber daya manusia adalah dengan melihat pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Intelektual seseorang pada umumnya akan semakin meningkat seiring dengan bertambah tingginya tingkat pendidikan seseorang. Pendidikan dapat menjadikan sumber daya manusia lebih cepat mengerti dan siap dalam menghadapi perubahan dan pembangunan suatu negara. Hampir semua negara berkembang menghadapi masalah kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang diakibatkan oleh rendahnya mutu pendidikan. Pendidikan yang ditamatkan merupakan salah satu ukuran kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dicapai, maka semakin tinggi pula kualitas sumber daya manusia yang dimiliki, sehingga selain bisa memperoleh pekerjaan yang

layak dengan gaji/upah yang sesuai, tingginya tingkat pendidikan juga dapat mencerminkan taraf intelektualitas suatu masyarakat. Gambaran kualitas SDM Indonesia dilihat dari pendidikan yang ditamatkan yang disajikan pada gambar 4.5.



Dari gambar 4.5 diatas terlihat bahwa persentase tertinggi adalah penduduk yang tamat SD/MI sebesar 32,86 persen, diikuti tamat SMP/MTs sebesar 24,16 persen, dan sebesar 15,56 persen tamat SMA/MA. Sedangkan persentase penduduk yang tamat PT sebesar 4,03 persen. Disamping itu masih terdapat sebesar 4,8 persen penduduk Rembang usia 15 tahun ke atas yang tidak/ belum pernah mengenyam pendidikan dan sebesar 18,59 persen pernah bersekolah di SD/MI namun tidak tamat.



BAB V KESEHATAN

Pembangunan di bidang kesehatan bertujuan agar semua masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara murah, mudah dan merata. Dengan adanya program tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang baik dan optimal. Meskipun sasaran akhir dari upaya pembangunan kesehatan adalah seluruh lapisan masyarakat, namun secara operasional dipilih menurut golongan secara bertahap. Hal ini dilakukan mengingat kepentingan yang mendesak sesuai prioritas dan ketersediaan dana, sarana dan prasarana.

Kesehatan merupakan faktor penting dalam pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas. Adapun indikator yang digunakan untuk mengetahui derajat kesehatan suatu negara adalah mortalitas, morbiditas dan status gizi. Mortalitas terdiri dari 4 indikator yaitu Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKABA), Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Harapan Hidup (AHH).

Isu gender dalam bidang kesehatan sangat terkait erat dengan terciptanya kesetaraan dan keadilan gender dalam bidang pelayanan kesehatan dan program/kebijakan kesehatan.

Upaya perbaikan kesehatan di kabupaten Rembang sejauh ini telah diarahkan untuk dapat meningkatkan mutu dan jumlah pelayanan kesehatan yang makin terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Seberapa besar perempuan di kabupaten Rembang telah memperoleh hak-haknya di bidang pelayanan kesehatan dapat disampaikan sebagai berikut :

5.1 Fasilitas dan Tenaga Kesehatan

Untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dilakukan antara lain menambah ketersediaan fasilitas kesehatan dan sarana kesehatan. Meskipun kemudahan untuk memperoleh pelayanan kesehatan makin terpenuhi, namun



upaya untuk meningkatkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan masih terus dilakukan. Untuk mengatasi permasalahan kesehatan masyarakat, pemerintah kabupaten Rembang telah membangun dan memperbaiki Puskesmas dan Rumah Sakit Umum.

Tabel. 5.1. Banyaknya Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Rembang Tahun 2016 - 2018

No	Fasilitas Kesehatan	2016	2017	2018
1	2	3	4	5
1.	Rumah Sakit	2	2	3
2.	Puskesmas	16	17	17
3.	Puskesmas Pembantu	69	69	69
4.	Puskesmas Keliling	16	17	17
5.	PKD	162	159	175
6.	Posyandu	1.228	1.229	1.233

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang

Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang tahun 2018 menunjukkan di Kabupaten Rembang sudah terdapat 3 (dua) Rumah Sakit yaitu RSUD Dr. R. Soetrasno, RSI Arofah, RS Bina Bakti Husada yang berlokasi di Kecamatan Rembang. Disamping itu juga terdapat 17 Puskesmas tersebar di masing-masing kecamatan tetapi ada dua kecamatan yang memiliki 2 Puskesmas yaitu kecamatan Rembang, kecamatan Kragan dan kecamatan Sarang. Selain Puskesmas terdapat juga 69 buah Puskesmas Pembantu dan 175 buah Pos Kesehatan Desa/PKD. Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yaitu diantaranya adalah Posyandu sebanyak 1.233 buah yang tersebar di 294 desa. Hal ini membuktikan bahwa partisipasi di bidang kesehatan tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah daerah saja namun partisipasi masyarakatpun sudah ada.



Dengan demikian dari sisi sarana pelayanan kesehatan dasar untuk masyarakat terutama untuk pelayanan kesehatan pada umumnya sudah tidak ada masalah baik dari sisi jumlah maupun keberadaannya.

Sejalan dengan meningkatnya fasilitas kesehatan, penambahan tenaga kesehatan yang meliputi dokter, perawat/bidan terus diusahakan oleh pemerintah. Pada tahun 2018 di **RSU Dr. R. Soetrasno** Kabupaten Rembang telah dilayani oleh 441 orang tenaga yang terbagi dalam tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan baik laki-laki dan perempuan. Untuk tenaga kesehatan sebanyak 441 dengan rincian sebagai berikut : dokter spesialis 21 orang, dokter umum 6 orang, Dokter Gigi 1 orang, Bidan 20 orang, Perawat 143 orang, Paramedis Non Keperawatan 64 orang serta Non Paramedis 185 orang. Sedangkan tenaga kesehatan secara keseluruhan di RSU dr. Soetrasno disajikan pada tabel 5.2 di bawah ini.

Tabel 5.2. Tenaga Kesehatan di RSU Dr. R. Soetrasno Rembang, Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kabupaten Rembang Tahun 2017 - 2018

No.	Tenaga Kesehatan	Jenis Kelamin 2017		Jenis Kelamin 2018	
		L	P	L	P
1.	Dokter Spesialis	10	8	11	10
2.	Dokter Umum	3	4	2	4
3.	Dokter Gigi	0	1	0	1
4.	Bidan	0	18	0	20
5.	Perawat	54	103	50	93
6.	Paramedis Non keperawatan	31	45	24	40
7.	Non Paramedis	57	89	91	94
JUMLAH		155	268	179	262

Sumber : Data RSUD dr. Soetrasno Rembang.

Hal yang menggembirakan di sini adalah untuk tenaga kesehatan yang ada di RSUD R. Soetrasno, Dinas Kesehatan dan Puskesmas, sebagian besar

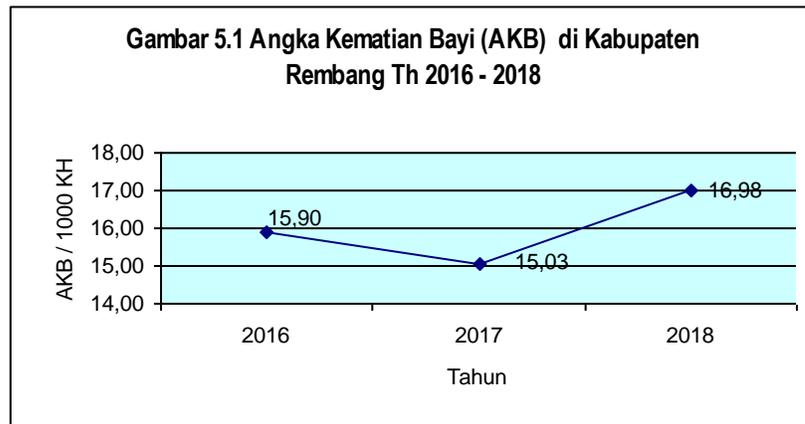
yang ditempatkan adalah perempuan. Hal ini dapat dikatakan bahwa perempuan sangat berperan dalam bidang pelayanan kesehatan.

5.2 Angka Kematian Bayi (AKB)

Kematian Bayi adalah kematian yang terjadi pada bayi sebelum mencapai usia 1 tahun. Angka Kematian Bayi adalah jumlah bayi berumur < 1 tahun yang meninggal dalam kurun waktu 1 tahun yang dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup.

Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang menyatakan jumlah Angka Kematian bayi (AKB) pada tahun 2018 sebesar 16,98/1.000 KH. Apabila dibandingkan dengan tahun 2017, AKB di Kabupaten Rembang mengalami peningkatan dari 15,03/1.000 KH menjadi 16,98/1.000 KH pada tahun 2018 atau dari 135 kasus kematian bayi pada tahun 2017 menjadi 149 kasus kematian bayi pada tahun 2018.

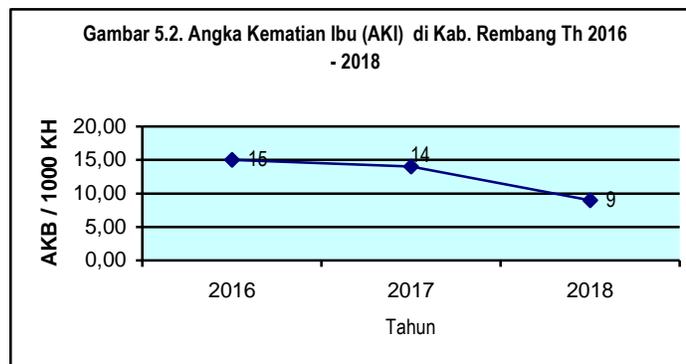
Untuk mengetahui perbandingan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Rembang dari tahun 2016 s/d tahun 2018 disajikan pada gbr 5.1



5.3 Kematian Ibu/*Reproductive Health*

Kematian maternal / ibu yang sedang hamil/melahirkan/dalam masa nifas erat kaitannya dengan kehamilan dan persalinan. Kematian ibu lebih banyak disebabkan oleh komplikasi maternal/komplikasi yang terjadi akibat pendarahan selama persalinan yang tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti penolong kelahiran pertama, kondisi tubuh ibu, dan lain sebagainya.

Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kabupaten Rembang menyatakan Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Rembang mengalami penurunan Tahun 2017 14 kasus sedangkan tahun 2018 menjadi 9 kasus kematian ibu. Perkembangan Angka Kematian Ibu (AKI) dan jumlah kasusnya antara tahun 2016 s/d 2018 dapat dilihat pada gambar 5.2 di bawah ini ;



5.4 Partisipasi Dalam Program KB

Peran serta masyarakat dalam Keluarga Berencana (KB) disamping bertujuan sebagai pengendalian pertumbuhan penduduk, juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta keluarga.

Namun hal yang ironis bagi perempuan adalah dari pelaksanaan program yang dapat dikaitkan dengan isu jender adalah keterlibatan perempuan dalam pelaksanaan KB yang sering diikuti oleh keterlibatan laki-laki pada program



yang sama. Sejalan ini keterlibatan laki-laki pada program KB hanya terbatas pada jenis MOP/vasektomi dan kondom, sementara perempuan terlibat dalam banyak program/cara KB seperti, MOW, AKDR/IUD, suntik, susuk dan pil.

Pada tahun 2018 persentase Pasangan Usia Subur (PUS) pernah ber KB dan yang masih aktif mengikuti program KB sebesar 80,02 persen, jika dibandingkan dengan tahun 2017 mengalami sedikit penurunan, sedangkan yang tidak ber KB 19,98 persen. (Tabel 5.3).

Tabel 5.3. Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang pernah menggunakan alat/cara KB Kabupaten Rembang

Keterlibatan KB	Tahun		
	2016	2017	2018
1	2	3	4
Sedang ber KB	72,65	83,48	80,02
Tidak Ber KB	13,18	15,89	19,98

Sumber : DINSOSPPKB Kabupaten Rembang tahun 2016 - 2018

Yang dimaksud dengan wanita usia subur (WUS) adalah wanita usia 15 sampai dengan 49 tahun. Pada tahun 2018 di Kabupaten Rembang tercatat sebesar 107.184 WUS, dan sebesar 135.460 berstatus kawin dan disebut dengan pasangan usia subur (PUS). Kelompok umur WUS dan PUS disajikan pada tabel 5.4.

Tabel 5.4 Banyaknya WUS dan PUS Kabupaten Rembang Tahun 2016 - 2018

Tahun	Jumlah	
	WUS	PUS
1	2	3
2016	172.590	134.537
2017	174.553	137.874
2018	107.184	135.460

Sumber : Data DINSOSPPKB Kabupaten Rembang tahun 2016- 2018



Partisipasi WUS yang berstatus kawin (PUS) dalam memakai alat kontrasepsi cenderung bervariasi dalam tiga tahun terakhir. Alat/cara KB suntikan, pil, spiral dan susuk merupakan jenis yang sudah banyak digunakan oleh WUS di Kabupaten Rembang. Pemilihan alat/cara KB ini agaknya didasarkan pertimbangan efisiensi penggunaan, biaya dan kenyamanan penggunaannya.

Pada tahun 2018 sebagian besar akseptor KB memilih cara KB suntik sebesar 50,48 persen, kemudian yang menggunakan susuk sebesar 23,73 persen, pengguna pil sebesar 16,87 persen dan sebesar 5,06 persen (IUD, MOP, MOV, Kondom dan lainnya), lebih terincinya disajikan pada tabel 5,45

Tabel 5.5 Persentase Peserta KB Menurut Alat/Cara KB Kabupaten Rembang Tahun 2016– 2018

Alat/Cara KB	Tahun		
	2016	2017	2018
1	2	3	4
M O W	1,98	1,51	2,14
M O P	0,29	0,04	0,34
AKDR / IUD	2,50	3,99	5,06
Suntik	64,65	43,86	50,48
Susuk/IMP	13,18	27,98	23,73
Pil	16,54	19,97	16,87
Kondom	0,86	2,63	1,37

Sumber : Data DINSOSPPKB tahun 2016 - 2018

5.5 Penolong Persalinan

Dilihat dari kesehatan ibu dan anak, persalinan yang ditolong oleh tenaga medis seperti dokter dan bidan mempunyai resiko lebih kecil bila dibanding dengan ditolong oleh dukun beranak (paraji). Kesehatan balita selain dipengaruhi oleh kesehatan ibu juga dipengaruhi oleh faktor lain, diantaranya



adalah penolong kelahiran. Data komposisi penolong kelahiran bayi dapat dijadikan salah satu indikator kesehatan terutama dalam hubungannya dengan tingkat kesehatan ibu dan anak serta pelayanan kesehatan secara umum.

Tabel 5. 6 Persentase Penolong Persalinan Anak Terakhir Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Rembang Tahun 2017 – 2018

Penolong Persalinan	Tahun 2017			Tahun 2018		
	P	L	Jumlah	P	L	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
Dokter	--	--	28,05	--	--	35,40
Bidan	--	--	69,83	--	--	64,12
Dukun	--	--	2,12	--	--	0,43

Sumber : Diolah dari data DKK Kabupaten Rembang Tahun 2017 - 2018

Dari hasil data DKK Kabupaten Rembang tahun 2018 menunjukkan persentase penolong kelahiran anak terakhir di Kabupaten Rembang terbanyak adalah oleh bidan yaitu 64,12 persen, kedua oleh dokter sebesar 35,40 persen dan 0,43 oleh dukun .

5.6 Lama Pemberian ASI

Data tentang pemberian ASI eksklusif sulit diperoleh karena pencatatan tentang hal tersebut belum ada. Dari pengalaman secara acak di lapangan banyak ditemukan faktor yang menjadi kendala sehingga pemberian ASI eksklusif tidak bisa terlaksana dengan baik. Salah satu faktornya adalah pemberian makanan tambahan (pendamping) selain ASI terlalu awal (belum waktunya) diberikan, termasuk juga semakin banyaknya jumlah wanita yang bekerja pada berbagai lembaga formal. Disamping itu yang tidak bisa dikesampingkan adalah pengaruh orang tua/mertua yang masih sangat dominan dalam membuat suatu keputusan dalam keluarga.



Tabel 5.7 Persentase Baduta usia 0 - 23 Bulan yang Pernah Disusui menurut Lama Disusui dan Jenis Kelamin Kabupaten Rembang Tahun 2017 -2018

Lama Disusui (Bulan)	Tahun 2017			Tahun 2018		
	P	L	JUMLAH	P	L	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
0 – 5	10,11	21,51	14,50	5,07	5,01	10,07
6 – 11	32,27	38,60	34,71	5,39	5,16	10,56
12 – 17	25,06	19,49	22,91	11,29	10,56	21,86
18 -23	32,57	20,40	27,88	11,29	10,56	21,86

Sumber : Diolah dari data DKK Kabupten Rembang tahun 2017 - 2018

5.7 Imunisasi

Imunisasi pada balita sangat penting yaitu untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh terhadap penyakit. Apabila balita sudah tidak rentan terhadap penyakit, maka tingkat pertumbuhan dan perkembangan anak akan optimal. Pekan Imunisasi Nasional (PIN) yang sering digalakkan ternyata mampu meningkatkan jumlah dan persentase anak balita yang diimunisasi, meskipun pada kenyataannya belum seluruh pelosok desa tercakup. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan tenaga, biaya, sarana dan prasarana yang kurang menunjang.

Imunisasi dasar lengkap pada bayi usia 0 – 11 bulan terdiri dari BCG 1 kali, DPT 3 kali, HB 3 kali, Polio 4 kali dan Campak 1 kali. Dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang tahun 2018, persentase bayi yang sudah diimunisasi BCG sebesar 96,54 persen, DPT 1/HB 1 sebesar 92,90 persen, DPT 3 / HB 3 sebesar 94,43 persen, Polio 4 sebesar 94,26 persen dan Campak sebesar 97,83 persen.



Tabel 5.8
Persentase Bayi usia 0 -11 Bulan yang Pernah di Imunisasi
menurut Jenis Imunisasi Kab. Rembang Th 2016 - 2018

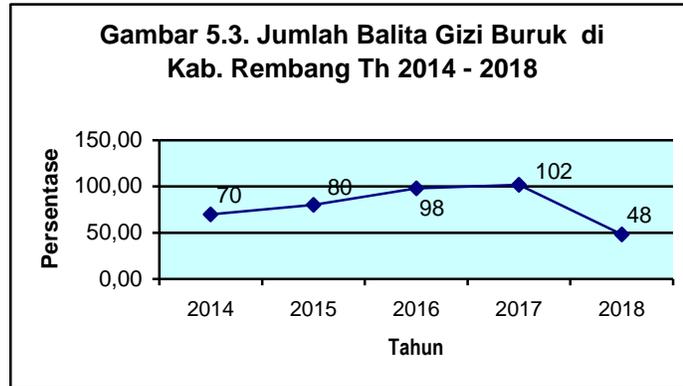
Jenis Imunisasi	Tahun 2017	Tahun 2018
1	4	5
BCG	96,80	96,54
DPT 1 / HB 1	98,00	92,90
DPT 3 / HB 3	96,80	94,90
Polio 4	94,80	94,26
Campak	94,70	97,83

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang 2017 - 2018

5.8 Status Gizi

Gizi yang baik tentu sangat menunjang kualitas sumber daya manusia. Gizi yang baik akan berpengaruh terhadap kesehatan dan juga kecerdasan, terutama pada balita/anak-anak pada umumnya sebagai generasi penerus. Untuk itu hendaknya kita selalu memperhatikan status gizi balita dan anak-anak untuk masa depan yang lebih baik. Pengukuran status gizi balita didapatkan dengan cara membandingkan berat badan (BB) dan tinggi badan (TB). Pada akhir tahun 2018 di Kabupaten Rembang ditemukan balita gizi buruk (BB/TB) sebanyak 48 balita.

Dari perkembangan gizi buruk (BB/TB) di Kabupaten Rembang pada akhir tahun 2017 tercatat jumlah balita gizi (BB/TB) sebanyak 102 balita. Sedangkan untuk melihat kasus balita gizi buruk dari tahun 2014 s/d 2018 disajikan pada gambar 5.3.



Dari gambar 5.3 diatas, jumlah balita gizi buruk tahun 2018 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2017 dan tahun-tahun sebelumnya.



BAB VI KEGIATAN EKONOMI

Perempuan sebagai salah satu sumber daya manusia (*human resources*) bagi pembangunan mempunyai peranan yang sama pentingnya dengan laki-laki. Perempuan memiliki kesempatan dan hak yang sama untuk turut serta berperan dalam pembangunan dengan tanpa adanya pembedaan dengan laki-laki. Jika diperhatikan sekarang ini peranan perempuan dalam kegiatan ekonomi baik di tingkat nasional maupun regional menunjukkan adanya peningkatan. Hal ini tidak terlepas dari perubahan sosial ekonomi (*social economic*) serta perubahan sosial budaya (*social culture*) pada masyarakat kita. Disamping itu semakin banyaknya keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi tersebut juga didukung oleh semakin tingginya jenjang tingkat pendidikan perempuan. Hal tersebut memungkinkan perempuan memiliki peluang yang lebih banyak untuk memasuki wilayah pekerjaan yang selama ini hanya didominasi oleh kaum laki-laki.

Dalam dunia pekerjaan persentase perempuan dalam angkatan kerja, disatu sisi menunjukkan keterlibatan langsung perempuan dalam kegiatan ekonomi, di sisi lain menunjukkan berhasil tidaknya pemberdayaan perempuan dalam membantu serta meningkatkan penghasilan keluarga. Tingginya persentase perempuan dalam angkatan kerja mengindikasikan semakin meningkatnya *double house-hold* yakni rumah tangga dimana suami maupun istri bekerja untuk penghasilan keluarga.

Namun harus kita sadari bahwa secara umum partisipasi perempuan dalam beberapa sektor kegiatan ekonomi masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan laki-laki. Disamping itu keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi masih diwarnai dengan adanya diskriminasi.



6.1 Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja (bekerja dan pengangguran) terhadap jumlah penduduk usia kerja. Semakin tinggi TPAK menunjukkan semakin besar bagian dari penduduk usia kerja yang sesungguhnya terlibat, atau berusaha untuk terlibat, dalam kegiatan produktif yaitu memproduksi barang dan jasa, dalam kurun waktu tertentu.

TPAK di Kabupaten Rembang pada Agustus 2018 tercatat sebesar 67,46 persen. Hal ini berarti bahwa dari 100 orang penduduk usia kerja, sekitar 67 orang termasuk angkatan kerja. Atau dapat diartikan dari 1.000 orang penduduk usia kerja sekitar 675 orang diantaranya aktif secara ekonomi. Dibandingkan Agustus 2017 (70,78 persen), TPAK Agustus 2018 mengalami penurunan.

Tabel 6.1 Penduduk Usia Kerja , Angkatan Kerja dan TPAK Menurut Jenis Kelamin Rembang Agustus 2017- Agustus 2018

Kriteria	Agustus 2017			Agustus 2018		
	L	P	L + P	L	P	L+P
1	2	3	5	5	6	7
PUK	241.407	248.248	289.655	243.985	250.988	494.973
Angkatan Kerja	209.946	136.624	346.570	195.258	138.658	333.916
TPAK	86,97	55,04	70,78	80,03	55,24	67,46

Sumber : *Profil Ketenagakerjaan Kab. Rembang 2018*

Apabila dikaitkan dengan isu Gender pada Tabel 6.1 menunjukkan bahwa TPAK laki-laki jauh lebih besar daripada TPAK perempuan. Fakta yang menarik dalam analisis angkatan kerja menurut jenis kelamin adalah terjadi penurunan TPAK laki-laki dari 86,97 persen pada Agustus 2017



menjadi 80,03 persen pada Agustus 2018. Sebaliknya, TPAK perempuan mengalami sedikit peningkatan dari 55,04 persen menjadi 55,24 persen.

6.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai mereka yang tidak bekerja dan saat ini sedang aktif mencari pekerjaan, termasuk mereka yang pernah bekerja atau sedang dibebastugaskan sehingga menganggur dan sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha.

Jumlah pengangguran yang ada di Kabupaten Rembang (Tabel 6.2) pada Agustus 2018 sebanyak 9.598 orang atau sebesar 2,87 persen dari jumlah angkatan kerja, yang selanjutnya disebut juga Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Bila dibandingkan Agustus 2017 mengalami penurunan, baik secara absolut (11.052 orang) maupun persentase (3,19 persen). Dengan TPT Agustus 2018 sebesar 2,87 persen, berarti terdapat sekitar dua sampai tiga orang yang menganggur dari 100 orang angkatan kerja pada tahun 2018.

Turunnya pengangguran pada Agustus 2018 dibandingkan Agustus 2017 dimungkinkan adanya perubahan tren dari pekerjaan di sektor informal menjadi sektor formal di pasar kerja. Hal tersebut terlihat dari meningkatnya pekerja formal, terutama pada pekerja dengan status sebagai buruh/karyawan yang terserap di lapangan usaha industri, jasa dan lainnya. Kondisi demikian dipicu dengan berdirinya pabrik-pabrik berskala besar Kabupaten Rembang. Selain itu, angkatan kerja yang sebelumnya bekerja sebagai nelayan atau petani banyak yang berdiam diri di rumah, karena cuaca dan kondisi alam yang tidak mendukung untuk melakukan aktivitas pada dua pekerjaan tersebut.

Tabel 6.2 Penduduk Angkatan Kerja, Pengangguran dan TPT Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Rembang, Agustus 2017 – Agustus 2018

Kriteria	Agustus 2017			Agustus 2018		
	L	P	L+P	L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7
Angkatan Kerja	209.946	136.624	346.570	195.258	138.658	333.916
Pengangguran	7.505	3.547	11.052	6.381	3.217	9.598
TPT	3,57	2,60	3,19	3,27	2,32	2,87

Sumber : *Profil Ketenagakerjaan Kab. Rembang 2018*

Bila dilihat menurut jenis kelamin, TPT perempuan pada Agustus 2018 lebih kecil dari pada TPT laki-laki, yaitu 2,32 persen berbanding 3,27 persen. TPT perempuan dan laki-laki pada Agustus 2018 juga mengalami penurunan bila dibandingkan dengan Agustus 2017.



6.3 Lapangan Pekerjaan Utama

Kabupaten Rembang merupakan daerah pesisir dengan panjang pantai 63 km, kondisi tersebut menyebabkan mayoritas penduduk di Kabupaten Rembang bekerja di sektor pertanian dalam arti luas (petani dan nelayan) yaitu sebesar 44,77 persen dari semua penduduk yang bekerja.

Tabel 6.3. Jumlah dan Presentase Pekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Rembang, Agustus 2017 – Agustus 2018

Lapangan Pekerjaan Utama	Agustus 2017			Agustus 2018		
	L	P	L + P	L	P	L + P
1	2	3	4	5	6	7
Pertanian	72.563 63,44%	41.810 36,56%	114.373 100,00%	61.015 61,49%	38.206 38,51%	99.221 100,00%
Industri	25.591 55,65%	20.394 44,35%	45.988 100,00%	28.818 48,95%	30.053 51,05%	58.871 100,00%
Perdagangan	24.912 36,67%	43.021 63,33%	67.933 100,00%	28.668 41,71%	40.056 58,29%	68.724 100,00%
Jasa	21.919 47,08%	24.636 52,92%	46.555 100,00%	16.614 41,86%	23.071 58,14%	39.685 100,00%
Lainya	57.453 94,70%	3.216 5,03%	60.669 100,00%	53.763 92,99%	4.055 7,01%	57.817 100,00%
Jumlah	202.441 60,34%	133.077 39,66%	335.518 100,00%	188.877 58,24%	135.441 41,76%	324.318 100,00%

Sumber : Profil Ketenagakerjaan Kab. Rembang 2018

Pekerja sektor Pertanian menurun dimungkinkan karena sebagian pekerja pertanian beralih ke sektor Industri dan Perdagangan. Hal tersebut terlihat dari bertambahnya persentase pekerja pada kedua sektor tersebut. Sektor Perdagangan mengalami kenaikan sebesar 0,94 persen, karena pekerja



di sektor ini yang ciri-ciri informalitasnya memudahkan orang untuk masuk atau keluar. Selain beralih ke sektor perdagangan, pekerja pertanian tersebut juga beralih ke sektor Industri. Sektor Industri mengalami penambahan sebesar 4,44 persen.

Menurut jenis kelamin, selama dua tahun terakhir persentase penduduk laki-laki yang bekerja pada sektor Pertanian lebih tinggi dibandingkan persentase penduduk perempuan, yaitu lebih dari 60 persen. Hal yang serupa terjadi pada sektor Industri dan Lainnya, bahkan sektor Lainnya hingga mencapai lebih dari 90 persen. Sebaliknya, persentase penduduk perempuan yang bekerja di sektor Perdagangan dan Jasa lebih tinggi dibandingkan dengan persentase penduduk laki-laki yang bekerja di sektor yang sama selama dua tahun terakhir.

6.4 Status Pekerjaan Utama

Secara umum status pekerjaan utama dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) kategori yaitu; berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, berusaha dibantu buruh tetap, buruh/karyawan, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di non pertanian dan pekerja tidak dibayar (pekerja keluarga).

Tabel 6.4. Jumlah dan Presentase Pekerja Menurut Status Pekerja Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Rembang, Agustus 2017- Agustus 2018

Lapangan Pekerjaan Utama	Agustus 2017			Agustus 2018		
	L	P	L + P	L	P	L + P
1	2	3	4	5	6	7
Berusaha Sendiri	34.725 59,67%	23.470 40,33%	58.195 100,00%	31.848 57,08%	23.947 42,92%	55.795 100,00%
Berusaha dibantu buruh tidak tetap	43.328 71,56%	17.219 28,44%	60.547 100,00%	37.594 65,49%	19.811 34,51%	57.405 100,00%
Berusaha dibantu buruh tetap	8.824 67,18%	4.310 32,82%	13.134 100,00%	9.661 65,30%	5.133 34,70%	14.794 100,00%
Buruh / Karyawan	77.986 66,91%	38.575 33,09%	116.561 100,00%	74.397 65,90%	38.498 34,10%	112.895 100,00%
Pekerja bebas di pertanian	6.654 66,23%	3.393 33,77%	10.047 100,00%	1.878 47,59%	2.068 52,41%	3.946 100,00%
Pekerja bebas di non pertanian	19.248 88,04%	2.614 11,96%	21.862 100,00%	20.760 94,24%	1.270 5,76%	22.030 100,00%
Pekerja keluarga/ tidak dibayar	11.676 21,16%	43.496 78,84%	55.172 100,00%	12.739 22,17%	44.714 77,83%	57.453 100,00%
JUMLAH	202.441 60,34%	133.077 39,66%	335.518 100,00%	188.877 58,24%	135.441 41,76%	324.318 100,00%

Sumber : Profil Ketenagakerjaan Kab. Rembang 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari penduduk yang bekerja sebagian besar berstatus sebagai buruh/ karyawan yaitu sebesar 34,74 persen. Sementara penduduk perempuan 32,68 persen sebagai pekerja tak di bayar. Umumnya mereka membantu suami atau anggota rumah tangga lainnya yang



bekerja yang kebanyakan di sektor pertanian di pedesaan. Perempuan dianggap sebagai pekerja keluarga meskipun kadang perempuan menyumbangkan tenaga lebih banyak dibanding suaminya.

6.5 Pekerja Migran

Memiliki pekerjaan adalah idaman setiap umat manusia, tidak pandang bulu baik itu laki-laki maupun perempuan. Namun karena jumlah penduduk yang semakin banyak sementara lapangan pekerjaan yang tersedia terbatas sehingga sangat menyulitkan untuk mendapatkan pekerjaan yang seperti apa yang diharapkan. Apalagi dengan kondisi geografis Kabupaten Rembang yang tandus, kering sehingga menambah sulit bagi warganya untuk menekuni bidang pertanian yang sebagian besar adalah sawah tadah hujan. Namun ada diantara para pencari kerja ini tidak berputus asa, masih ada peluang untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri alias menjadi pekerja migran. Menurut data yang terkumpul dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang tercatat ada 1.833 orang pekerja migran dengan rincian 1.474 orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan 359 orang Tenaga Kerja Wanita (TKW) dengan negara tujuan terbesar adalah Malaysia. Berikut tabel jumlah Tenaga Kerja Indonesia khususnya yang berasal dari Kabupaten Rembang yang bekerja di luar negeri pada tahun 2018.



Tabel 6.5. Presentase Tenaga Kerja di Luar Negeri Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Rembang Tahun 2017 - 2018

No	Negara tujuan	Tenaga Kerja Th.2017				Tenaga Kerja Th.2018			
		Laki-laki		Perempuan		Laki-laki		Perempuan	
		Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
1	Arab Saudi	77	4,24	42	2,31	77	4,14	43	2,31
2	Singapura	8	0,44	8	0,44	8	0,43	16	0,86
3	Malaysia	1239	68,23	220	12,11	1249	67,11	213	11,45
4	Taiwan	19	1,05	35	1,93	22	1,18	32	1,72
5	Brunai D.	19	1,05	3	0,17	18	0,97	3	0,16
6	Abu Dabi	3	0,17	5	0,28	0	0	1	0,05
7	Kuwait	0	0	0	0	0	0	1	0,05
8	Hongkong	1	0,06	44	2,42	10	0,54	46	2,47
9	Jepang	58	3,19	1	0,06	61	3,28	0	0
10	Korea Selatan	25	1,38	2	0,11	22	1,18	4	0,21
11	Timor Leste	7	0,39	0	0	7	0,38	0	0
12	Oman	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Selandia Baru	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		1456	80,18	360	19,82	1474	79,21	359	19,28

Sumber data : Bidang Pentatrans Diskesosnakertrans 2018



BAB VII PEREMPUAN DI SEKTOR PUBLIK

Pada bagian ini akan diuraikan bagaimana posisi, peran dan keterlibatan perempuan di Kabupaten Rembang dalam pengelolaan sektor publik. Apakah para perempuan telah memiliki ruang dan kesempatan yang cukup dalam memperjuangkan hak-hak dan mampu mengoptimalkan potensi dirinya dalam suatu ranah kepublikan. Apakah para perempuan Rembang, di mana tempat Kartini sebagai tokoh emansipasi tumbuh, berkembang, dewasa, berkeluarga dan mengabdikan dirinya hingga akhir hayatnya disemayamkan telah berhasil keluar dari kungkungan feodalisme – patriarkis. Apakah para emansipatoris di sini telah mampu membuktikan diri bahwa ia adalah aktor strategis dan subyek penentu dalam kebijakan publik lokal dan kehadirannya tidak hanya sebatas obyek, *konco wingking* dan pelengkap penderita belaka. Sejauh mana perempuan Rembang memiliki pandangan-pandangan, keyakinan-keyakinan, nilai-nilai, semangat dan kemampuan untuk menemukan 'peta jalan' dalam membangun kesetaraan gender yang mapan, memiliki dukungan dan kepercayaan publik (*social trust*) secara luas dan berkesinambungan. Apakah para perempuan di sini telah merasa terpenggil dalam memperjuangkan partisipasi, transparansi dan akuntabilitas publik ke-perempuan-an dalam proses politik, kebijakan, pembangunan, pemberdayaan dan perlidungan terhadap sesamanya. Sejauh mana hubungan antara perempuan, demokrasi, desentralisasi dan *good governance* terbangun secara kuat dan mapan dalam tatanan *local's women soft politic* di kota ini?. Bagaimana komitmen mereka, apa saja yang telah berhasil diraih, apa yang belum dan gagal, bagaimana meraihnya, apa resep-resepnya dan dimana letak kelemahan dan kegagalannya serta bagaimana solusi untuk mereka agar sukses dalam memperjuangkan hak-haknya dalam politik dan kepublikan, baik di Legislatif, Eksekutif maupun Yudikatif serta peran-peran kepublikan lain yang lebih luas baik pada level kecamatan, desa hingga



di lingkungannya sendiri (RT/RW). Apakah para perempuan telah mampu mencapai kemerdekaan publik, baik pada ranah publik politik, negara, sosial, ekonomi, budaya dan publik lainnya.

Dalam kenyataan sehari-hari pada sektor publik, baik publik negara, pasar maupun masyarakat, yang termanifestasi dalam politik, pembangunan maupun pemberdayaan, istilah dan makna publik, selalu identik dengan dunia kelaki-lakian (maskulinitas). Dominasi dan hegemoni maskulinitas tumbuh subur dalam tradisi patriarki telah merebak dan mendarah daging melampaui batas nilai-nilai universal baik hak asasi manusia, demokrasi, desentralisasi, *good governance* dan lingkungan hidup. Hal ini dapat dilihat mulai dari cara pandang, nilai-nilai, norma, perilaku kebijakan (sistem operasional–mekanisme/prosedur) hingga struktur kelembagaan/wadah (kultur, struktur dan proses) yang ada selalu lekat dengan budaya kebabakan (*bapakisme*). Sehingga tidaklah berlebihan jika ruang, kesempatan dan produk kebijakan publik menjauh dari sensitivitas gender alias mengabaikan eksistensi, harga diri dan hak-hak asasi perempuan.

Wajah sektor publik kita menjadi 'bias laki-laki' dan semakin mendalamkan perilaku yang tidak permisif bahkan seolah semakin 'memojokan' terhadap kehadiran perempuan dalam peran-peran publik. "Dunia negara", "dunia umum" dan "dunia luar rumah" sebagai dunia bukan perempuan, sebaliknya perempuan identik dengan "dunia dapur, sumur dan kasur". Ruang tamu misalnya, juga bukan ruang perempuan, karena perempuan tidak boleh atau tidak etis menemui tamu, sebaliknya ia harus melayani, membawakan makanan dan minuman. Jika sang suami meninggal atau berpisah karena suatu hal, maka kepala rumah tangga adalah anak laki-laki tertua, bukan ibu. Patriarki tidaklah mengenal ibu sebagai *single parent*. Sebaliknya ibu adalah *konco wingking*, kehadirannya selalu mengkodrat sebagai "*wani ditata*" (wanita) dan perempuan sebagai *babon* atau *wadon*, *wedok* yang berarti sarana reproduksi, ia berkewajiban memberikan



keturunan biologis bagi keluarga, bukan pemimpin. Inilah wajah perempuan kita, di mana dalam rumah dan keluarga pun banyak didominasi oleh ruang laki-laki, apalagi dalam dunia publik negara atau yang lebih luas lagi. Perempuan seolah dilahirkan tidak sebagai warga masyarakat apalagi warga negara, sebaliknya hanya sebatas warga domestik. Apakah realitas sosial, publik dan politik di Rembang menandakan gejala demikian?. Apakah wajah dan kiprah perempuan di Kota Kartini telah mampu sebagai garda depan, *agent of change* sekaligus aktor utama (*leadher*) dalam kampanye *global soft politics*, yang tidak lain adalah perjuangan terhadap hak asasi manusia, gender, demokrasi, desentralisasi, *good governance* dan lingkungan hidup. Laporan bab ini akan mencoba melukiskan bagaimana potret perempuan dalam perjuangan penguatan peran di sektor publik di Kabupaten Rembang.

7.1 Partisipasi Perempuan dalam Bidang Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif

Pada tataran praktis kehadiran perempuan dalam sektor publik negara, khususnya legislatif, eksekutif dan yudikatif tidaklah seindah harapan mereka tentang makna representasi keperempuanan. Memang sensitivitas gender bukanlah semata-mata merujuk pada jenis kelamin juga tidak menunjuk pada besaran angka (jumlah--kuantitas). Sensitivitas gender lebih mengacu kepada kesadaran, penghargaan, kepekaan dan komitmen keberpihakan kepadanya. Meski demikian untuk mewujudkannya tidaklah mudah. Pembangunan kesadaran dan komitmen keberpihakan ternyata jauh lebih rumit dan memiliki banyak tantangan baik secara internal maupun eksternal. Tantangan ini terkadang kontra produktif bahkan anti terhadap gender. Kendala (*constrains*) itu meliputi baik kultural, struktural maupun proses dalam pengambilan keputusan-keputusan publik yang tidak memiliki *sense* terhadap perempuan.

Masih banyaknya para pimpinan pejabat publik politik, penegak hukum dan para biokrat pelayan masyarakat lainnya yang masih memandang sebelah mata



terhadap kapasitas dan kapabilitas perempuan dalam penyelesaian-penyelesaian masalah-masalah pemerintahan dan kenegaraan. Padahal jika dilihat dari sisi SDM, pengalaman dan peran nyatanya di masyarakat, sudah banyak perempuan yang tidak kalah dari laki-laki. Demikian juga dalam kiprah politik dan sosial kemasyarakatannya. Perempuan dalam banyak kasus selalu disudutkan dan disekap dengan dimensi kultural dan biologis yang membelitnya. Seperti ungkapan sinis yang ditujukan bagi perempuan yang dianggap terlalu aktif dan dianggap “*nglangkahi*” laki-laki, karena dianggap disfungsional domestik, seperti terlukis dalam ungkapan; “*untuk apa jadi perempuan yang tidak pomah, wong wedok kok awak dienggo sikil, sikil dienggo awak, wong wedok iku tenguk-tenguk ning omah wae cukup*”. Ungkapan lain yang bernada apologis seperti “*wong wedok ngene wae cukup, ora susah repot-repot. Wong wedok iso ngliwet karo dandan wis cukup, ora usah neko-neko....*”. Dan masih banyak lagi ungkapan-ungkapan lainnya.

7.2 Perempuan dan Legislatif

Di hampir seluruh daerah di Indonesia tidak terkecuali di Kabupaten Rembang, kehadiran perempuan secara kuantitatif selalu lebih banyak daripada laki-laki, demikian juga secara politik (hak suara). Data dari berbagai sumber (BPS, KPUD, Kesbang & Linmas) menunjukkan bahwa pada pelaksanaan Pilkada Rembang tahun 2014, terlihat dari jumlah total pemilih 425.546 jiwa, pemilih perempuan sebesar 214.434 sedangkan pemilih laki-laki 211.112 jiwa. Ini berarti bahwa realitas politik perempuan memegang posisi kunci dan menentukan dalam proses-proses politik suara. Sedangkan dari sisi kualitatif, komitmen perempuan dalam politik jauh lebih kuat di banding laki-laki. Perempuan dianggap lebih kuat untuk memegang teguh prinsip dalam memilih

dari pada laki-laki yang sangat rentan terhadap godaan *money politik* dan kampanye negaif lainnya.

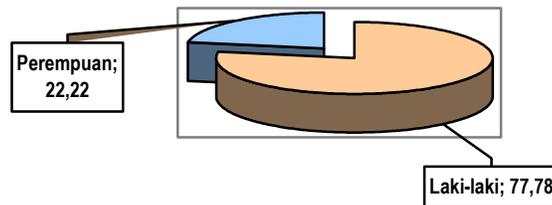
Namun demikian jumlah perempuan yang lebih besar secara real politik (*vote*) ternyata tidak sebanding dengan jumlah mereka yang berhasil sebagai anggota DPRD (legislator). Sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 7.1. Jumlah Anggota DPRD Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Rembang Tahun 2018

No.	Komisi	Perempuan	Laki-laki	Jumlah
1.	A	1	9	10
2.	B	3	8	11
3.	C	1	9	10
4.	D	4	6	10
Jumlah		9	32	41

Sumber: Sekretariat DPRD Tahun 2018

Gambar 7.1. Presentase Anggota DPRD Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Rembang Tahun 2018



Dari data tabel di atas jumlah perempuan dalam politik praktis di kabupaten Rembang, khususnya dalam Legislatif menunjukkan prinsip keterwakilan perempuan dalam kesetaraan gender. Hal itu bisa dilihat dari persentasenya keterwakilan yang cukup baik, 10 perempuan (22,22 %) yang berarti sudah mendekati syarat ideal, di mana sesuai UU No. 12 Tahun 2003 yang mengatur kuota 30 % untuk perempuan.



Dengan demikian ruang politik perempuan di Legislatif cukup *representable* terhadap gender sensitivities. Keterlibatan perempuan dalam pengelolaan sistem kebijakan publik yang bisa melindungi, memperjuangkan dan mengoperasikan hak-hak mereka untuk turut menentukan dan mewarnai setiap produk kebijakan jelas jauh dari harapan. Seperti bagaimana para perempuan bisa mengawal kepentingan mereka proses politik di DPRD mulai dari sidang komisi, panggung (panita anggaran) hingga paripurna misalnya. Apakah mereka telah memiliki akses politik kebijakan yang memadai mulai dari *input--procces--output* perumusan kebijakan publik jika mereka tidak bisa hadir di sana. Khususnya dalam pembuatan Perda dan berbagai kesepakatan-kesepakatan, persetujuan-persetujuan, nota kesepahaman, pandangan-pandangan umum, hingga pada kontrak-kontrak politik yang lainnya. Dampaknya jelas banyak produk hukum dan beberapa kebijakan di kota ini yang tidak ramah dan *welcome* terhadap keterlibatan perempuan.

Namun dengan jumlah yang sangat kecil dan kapasitas SDM yang pas-pasan ditambah penguasaan *issue-issue* pengarusutamaan gender yang kurang akan menyulitkan perjuangan mereka dalam perebutan ruang publik kebijakan untuk perempuan.

7.3 Perempuan dan Eksekutif

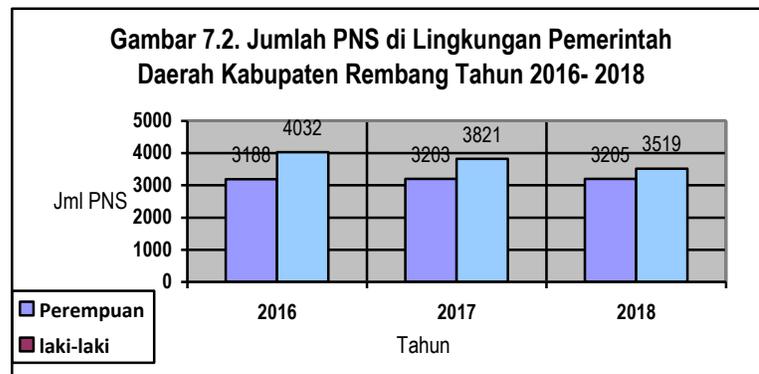
Eksistensi perempuan dalam birokrasi Pemda (eksekutif) menunjukkan kondisi yang memprihatinkan. Meski jumlah pegawai perempuan hampir sama dengan jumlah laki-lakinya, namun nasib birokrat perempuan tidak seberuntung dengan laki-laki. Perempuan masih menduduki posisi *pupuk bawang*, jumlah jabatan terbanyak pada eselon terendah (V) yang tersebar pada kantor kelurahan sebagaimana tergambar dalam beberapa tabel di bawah.



Tabel 7.2. Jumlah PNS Menurut Jenis Kelamin di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2016 - 2018

No	Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai 2016	Jumlah Pegawai 2017	Jumlah Pegawai 2018
1	Perempuan	3.188	3.203	3.205
2	Laki-laki	4.032	3.821	3.519
Jumlah		7.220	7.024	6.724

Sumber: BKD Tahun 2018



Tabel 7.3. Presentase Jumlah PNS Berdasarkan Eselon I, II, III, IV dan V di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2017 - 2018

No	Eselon	Tahun 2017				Tahun 2018			
		Perempuan		Laki-laki		Perempuan		Laki-laki	
		Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
1	I	0	0	0	0	0	0	0	0
2	II	1	4,76	20	95,24	3	0,56	23	4,31
3	III	22	16,92	108	83,08	26	4,87	104	19,48
4	IV	118	29,57	281	70,43	124	23,22	254	47,57
5	V	19	67,86	9	32,14	0	0	0	0
Jumlah		160	27,68	418	72,14	153	28,65	381	71,35



Sedangkan apabila kita lihat dari Jabatan fungsionalnya maka jumlah kaum perempuan lebih banyak di bidang pendidikan dan kesehatan, hal ini tentunya disebabkan karena kaum perempuan memiliki tingkat kesabaran yang tinggi dari pada laki-laki.

Tabel 7.4. Jumlah PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Berdasarkan Jabatan Fungsional

No	Jenis Jabatan Fungsional	Tahun 2017				Tahun 2018			
		Perempuan		Laki-laki		Perempuan		Laki-laki	
		Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
1	Guru	1660	56,62	1272	43,38	1.589	42,8	1.177	31,7
2	Penyuluh Pertanian	15	30,00	35	70,00	14	0,37	29	0,78
3	Penyuluh Kehutanan	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Penyuluh KB	1	100	0	0	0	0	0	0
5	Auditor	9	47,37	10	52,63	8	0,22	10	0,27
6	Instruktur	5	23,81	16	76,19	5	0,13	14	0,38
7	Penguji Kendaraan Bermotor	0	0	1	100	0	0	1	0,027
8	Kesehatan	588	74,81	198	25,19	652	17,58	209	5,6



Tabel 7.5. Jumlah PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Berdasarkan Jabatan Pemerintahan dari Tingkat Kecamatan, Kelurahan maupun Pedesaan Tahun 2017 – 2018

No	Jabatan Pemerintahan	Tahun 2017		Tahun 2018	
		Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki
1	2	3	4	5	6
1	Camat	0	14	0	9
2	Kepala Kelurahan	0	7	0	6
3	Kepala Desa	28	259	28	259
4	Sekdes	52	235	4	34
5	Anggota BPD	77	1.901	77	1.901
Jumlah		157	2.416	109	2.209

Sumber : Bagian Tapem Setda Rembang Tahun 2018

Ada banyak hal yang bisa menjelaskan setidaknya berawal dari diri pegawai negeri perempuan itu sendiri. Tentu kita sepakat bahwa sejauh apapun para perempuan memiliki karier akan lebih baik jika tetap memegang teguh agama dan kebudayaannya yang berarti sadar akan kodratnya sebagai wanita dan pemegang amanah sarana reproduksi/regenerasi atau pemberi keturunan.

Tetapi dalam tradisi birokrasi pemerintah daerah, naluri alamiah kewanitaan ini terkadang terlalu dieksploitasi dalam rancang bangun kebijakan kepegawaian khususnya dalam pengembangan karier mereka. Baperjakat dalam banyak kasus telah bergerak untuk mendalami upaya degenderisasi, di mana upaya promosi perempuan terkadang selalu dikaitkan dengan lingkungan horisontal maupun vertikalnya yang laki-laki. Perempuan *by design* diposisikan dalam “*perempuan di sarang penyamun*” yang tidak jauh dengan “*burung dalam sangkar*”. Kehadirannya tidak jarang perempuan dipandang sebagai sosok ikutan, atau *nunut mulyo* kepada yang laki-laki, baik di kantor maupun di rumah tangga. Tidak banyak diberikan pekerjaan yang menurut pandangan mereka pada pimpinan dan baperjakat “terlalu merepotkan/memberatkan perempuan” atau tidak cocok dengan perempuan.



Dalam diri birokrasi ternyata ada pemilahan secara *latent* sebagai pekerjaan perempuan dan pekerjaan laki-laki. Pandangan ini jelas melecehkan kaum perempuan di mana seolah-olah mereka bukan sosok pribadi yang mandiri, tegas dan memiliki integritas yang otonom dalam mengambil keputusan baik *public policy* maupun untuk diri dan masa depan mereka sendiri. Dari berbagai pengalaman yang ada perempuan selalu dikaitkan dengan suami, di mana para perempuan di lembaga ini bisa jadi tidak berkembang kariernya gara-gara posisi suami yang lebih rendah dari dirinya misalnya, baik secara pendidikan, posisi hingga pendapatan keluarga. Lebih repot lagi apabila cara pandang dalam kebijakan penataan kepegawaian dan pengembangan karier mereka sangat lekat dengan politik. Sementara perbedaan pendapat belum mendapatkan tempat yang layak dalam diri pemimpin-pemimpin di daerah, maka para perempuan bisa menjadi “korban” kebijakan yang terbanyak untuk kasus ini.

Bukan hanya problem kultural saja, secara struktural dan prosedural para perempuan juga mendapatkan halangan yang luar biasa ketika akan menduduki jabatan yang lebih tinggi. Mereka akan sulit untuk bisa berada pada posisi lebih tinggi dalam lingkungan kerjanya, apalagi jika terdapat teman sebaya/seangkatan atau sedikit lebih tinggi atau rendah darinya sementara mereka laki-laki. Perempuan ini akan mengalami kesulitan untuk bisa memimpin atau melangkahi satu tingkat di atasnya meskipun secara SDM dan kepemimpinannya mumpuni.

7.4 Perempuan dan Yudikatif

Sementara jajaran yudikatif memiliki sensitivitas gender yang sangat menyolok, untuk Kejaksaan memiliki 15 Jaksa, perempuannya ada 3. Dan dari institusi yudikatif, Kepolisian termasuk yang tertinggal dalam pengarusutamaan gender, yakni dari 657 orang, polisi perempuan (polwan) hanya 40 orang, sedangkan laki-lakinya mencapai 657 jiwa. Sedangkan lembaga pengadilan /



kehakiman pengarusutamaan gender sudah seimbang yaitu dari 7 hakim yang ada, 4 orang hakim perempuan dan 3 hakim laki-laki. .

Perempuan terlepas dari klaim yang dibangun dalam pengembangan SDM di Indonesia yang patriarkis, kelemahan yang lemah lembut itu justru sekaligus keunggulan dalam membangun jati diri khususnya di dunia pengadilan. Wanita dianggap lebih teliti, hati-hati dan cermat dalam proses pengambilan keputusan, oleh karena itu pada bidang ini mereka mendapatkan tempat yang cukup layak. Bisa jadi ini kasus lokal dan secara kebetulan, tetapi keterlibatan perempuan dalam lembaga kepengacaraan ternyata sama banyaknya dengan laki-laki. Hal ini berbeda dengan kejaksaan yang dianggap masih dibutuhkan dimensi kekerasan dan ketegasan dalam pekerjaannya. Apalagi institusi kepolisian yang masih kuat dengan klaim tradisi kekerasannya. Tentu ini adalah tantangan besar dalam mengembangkan kelembagaan sekaligus penataan SDM dalam arti yang lebih luas. Terlebih di era *soft politics* saat ini menjadi tertinggal dan tidak menarik bagi siapapun jika tidak segera melakukan koreksi dan langkah-langkah nyata dalam merespon dan mengembangkan sensitivitas gender. Karena sejauh apapun peran lembaga-lembaga negara adalah sebagai pelayan publik termasuk dalam pelayanan penegakan hukum dan pengayoman masyarakat. Karena penegakan dan pengayoman adalah bentuk pelayanan publik negara, maka sudah seharusnya watak yang dikembangkan adalah watak pelayan yang harus sopan, lembut dan berbudaya.



Tabel 7.6. Jumlah Hakim, Jaksa dan Polisi Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Rembang Tahun 2017 - 2018

No	Jabatan	Tahun 2017		Tahun 2018	
		Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki
1	2	3	4	5	6
1	Hakim	2	3	4	3
2	Jaksa	2	11	3	12
3	Polisi	37	654	33	642
Jumlah		41	668	40	657

Sumber : Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, Polres Tahun 2017 - 2018

7.5 Partisipasi Perempuan dalam Partai Politik

Perjuangan kesetaraan gender adalah salah satu upaya mewujudkan demokratisasi, karena dengan kesetaraan gender seluruh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan mempunyai akses untuk melakukan proses demokratisasi itu sendiri. Dan partai politik menjadi wadah tak terhindarkan jika perempuan ingin memperkuat dirinya dalam membangun kebijakan kesetaraan gender. Mengingat partai politik adalah rahim legislator.

Namun dalam praktik partai politik tidak beda jauh dengan lembaga negara lain, yang tetap saja melihat sebelah mata terhadap eksistensi perempuan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, *pertama* banyak wajah partai yang merasa masih efektif menggunakan metode mobilisasi sebagai strategi terbaik. Strategi ini bukan hanya mengandalkan peran lapangan dan praktik dari pada peran-peran domestik dan konseptual. Dengan strategi demikian partai politik masih menganggap relevan dikembangkan budaya keras seperti intimidasi dan pemaksaan baik melalui media pekerjaan, *money politic*, keluarga, maupun perkawanan. Sehingga tidak mengherankan jika kehadiran perempuan dalam pengurus harian partai sangat rendah. Terlebih lagi UU politik no 32 th 2004 sebagai pengganti UU no 12 th 2003 tidak mengatur secara eksplisit tentang



persentasi kehadiran sebagai syarat wajib dalam penentuan anggota legislatif dari masing-masing partai. Akibatnya banyak partai yang menganggap tidak penting keterlibatan perempuan dalam politik praktis. Padahal jika kita melihat arah ke depan, demokrasi, desentralisasi, lingkungan, dan *good governance* jelas tidak akan surut sebaliknya terus akan menguat. Maka akan menjadi sulit jika para pemilik partai tidak segera menjemput perubahan politik. Mereka harus segera mengubah pendekatan dari tradisi *hard politics* ke arah *soft politics*.

Perempuan agar bisa eksis dan kuat pada sektor publik sudah seharusnya mereka mendapatkan pendidikan, pekerjaan, hak milik dan hak pilih yang sama dan adil dengan laki-laki. Perempuan juga harus sudah mulai secara sadar dan bertanggung jawab tidak membelenggu diri mereka untuk urusan-urusan domestik saja, ibu rumah tangga & berbagai pembatasan-pembatasan atas kehormatan mereka. Para perempuan sudah seharusnya memperjuangkan Hak asasi kemanusiaannya dan bersaing secara seimbang dengan pria dalam bidang politik dan pekerjaan. Para perempuan di Rembang harus mulai berani untuk “menantang patriarki”, dan memperjuangkan secara gigih, tekun, teratur dan konsisten terhadap kesetaraan gender, termasuk dalam kekuasaan publik negara, swasta dan pasar.



Tabel 7.7. Jumlah Pengurus Harian Partai Politik di Kabupaten Rembang Tahun 2018

No	Nama Parpol	Perempuan	%	Laki-laki	%	Jumlah
1.	Partai Persatuan Pembangunan	0	0	3	100	3
2.	Partai Keadilan Sejahtera	0	0	3	100	3
3.	Partai Amanat Nasional	1	33	2	67	3
4.	Partai Kebangkitan Bangsa	0	0	3	100	3
5.	Partai Keadilan dan Persatuan Bangsa	0	0	3	100	3
6.	Partai Golongan Karya	1	33	2	67	3
7.	Partai Perindo	0	0	3	100	3
8.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1	33	2	67	3
9.	Partai Nasdem	0	0	3	100	3
10.	Partai Hanura	0	0	3	100	3
11.	Partai Gerindra	0	0	3	100	3
12.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	1	33	2	67	3
13.	Partai Demokrat	0	0	3	100	3
14.	Partai Berkarya	1	33	2	67	3
15.	Partai Solidaritas Indonesia	1	33	2	67	3
16.	Partai Bulan Bintang	0	0	3	100	3
	JUMLAH	6		42		

Sumber : KPUD Tahun 2018

Oleh karena itu ada beberapa hal yang bisa dilakukan para perempuan di Rembang antara lain: *Pertama*, pendidikan kader politik untuk menempati pranata-pranata demokrasi mulai dari tingkat paling bawah, seperti *Dewan Kelurahan, Dewan Kota, Badan Perwakilan Desa* sampai ke *DPRD Kabupaten atau Kota*. *Kedua*, membangun dukungan politik untuk memfasilitasi perempuan yang mempunyai kapabilitas dalam kepemimpinan politik. *Ketiga*, membentuk *forum perempuan lintas partai* politik yang tidak terbatas pada parpol peserta



pemilu, akan tetapi berasal dari parpol-parpol yang bukan peserta pemilu. *Keempat*, mendesakkan gagasan keadilan dan kesetaraan gender untuk seluas mungkin diatur dalam AD/ART partai politik, juga program politik parpol. *Kelima*, menyusun kerangka kerja peningkatan kualitas peran politik perempuan di lembaga perwakilan serta mengimplementasikannya dengan dukungan sumber daya yang memadai. *Keenam*, mendesakkan calon perempuan menjadi kepala daerah dan memastikan bahwa sebagian besar perempuan akan mendukungnya sehingga kemungkinan perempuan duduk sebagai kepala daerah lebih terbuka.

Seperti halnya kaum pria, perempuan pun perlu aktualisasi diri sebagai wanita (kodrati), anggota masyarakat, dan warga negara. Memang Feminisme masih perlu perjuangan panjang menuju kesetaraan dan keadilan gender, namun, ia tidak boleh lepas dari kaedah agama dan budaya sehingga keberadaan kodrati perempuan tidak terkikis.

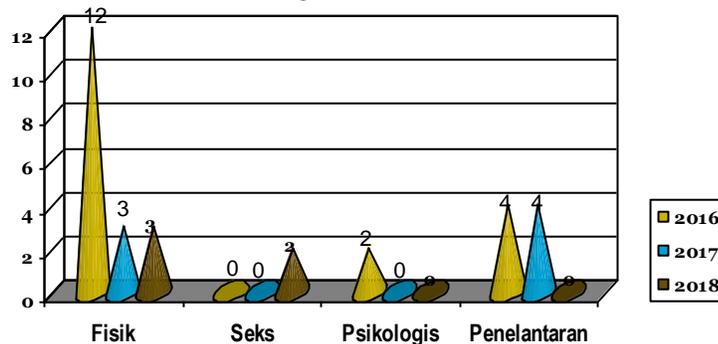


BAB VIII KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Kekerasan/*Violence* yang terjadi pada perempuan sudah sejak lama terjadi hal tersebut dapat dimaklumi, dimana budaya patriarki telah melekat kuat bagi perempuan yang berakibat status dan posisi perempuan berbeda dengan laki-laki di dalam rumah tangga, tempat kerja, adat istiadat dan masyarakat luas, maupun di semua bidang kehidupan perempuan.

Data yang tercatat dari Unit Pelayanan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Semai RWC3 di Tahun 2018 bahwa telah terjadi 5 Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yaitu 3 kasus kekerasan fisik KDRT, 2 kasus kekerasan seksual. Sedangkan untuk kasus Kekerasan terhadap Anak ada 15 kasus yang terbagi menjadi 3 kekerasan fisik, 11 kasus seksual dan 1 kasus pelantaran, tentunya data atau angka tersebut belum menggambarkan fakta yang sebenarnya karena banyak korban kekerasan yang tidak mau mengungkapkan kekerasan yang dialami.

Gambar 8.1. Jumlah dan Jenis Kekerasan terhadap Perempuan di Kabupaten Rembang Tahun 2016 - 2018





Banyaknya korban kekerasan yang tidak melaporkan kasusnya kepada aparat penegak hukum disebabkan oleh banyak hal seperti adanya anggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah persoalan domestik, sehingga orang lain tidak berhak mencampurinya. Demikian pula dengan korban kekerasan lainnya, seperti perkosaan yang takut melaporkan karena malu diketahui orang lain bahwa dirinya sudah tidak “ Suci / Perawan “ lagi, sehingga sering kali kekerasan terhadap Perempuan disebut sebagai kriminalitas tersembunyi (*The Hidden Crime*). Meningkatnya kasus kekerasan yang terjadi baik di lingkup publik maupun privat dapat diibaratkan sebagai Fenomena Gunung Es karena yang diketahui publik sangat sedikit, sementara kondisi yang sebenarnya tersembunyi dibawah permukaan.

Peningkatan kekerasan terhadap perempuan dan anak ini sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi keluarga. Sebagai akibat dari adanya krisis Ekonomi yang berkepanjangan muncul keluarga-keluarga miskin baru yang berpotensi sangat besar pada krisis moral, rendahnya kesempatan memperoleh pengetahuan dan ketrampilan, cenderung melakukan perbuatan yang diluar kontrol.

Pornoaksi dan pornografi yang semakin mudah diakses/didapat akibat kemajuan teknologi yang begitu pesat, dan hal ini tidak bisa dihindari berimbas pada tindakan pelecehan seksual sebagai pelampiasan hasrat seksual yang tidak/belum bisa tersalurkan.

Banyaknya anak jalanan dan anak terlantar yang ada di Kabupaten Rembang memberikan gambaran sebagai salah satu akibat dari kekerasan terhadap perempuan.

Kodrat seorang perempuan yang mengandung, melahirkan dan menyusui membuat kedekatan emosional maupun kedekatan batin dengan



anaknyanya, sehingga seorang ibu/perempuan akan berpengaruh dan menentukan generasi masa depan.

Apabila terjadi ketidak setaraan serta perlakuan yang buruk terhadap perempuan maka akan berakibat terhadap anak dan keluarganya, karena bagaimana seorang ibu dapat memperlakukan anaknya dan keluarganya dengan baik apabila perlakuan terhadap dirinya tidak bisa dikatakan baik.

Peraturan dan Undang-Undang sudah ada untuk menjerat pelaku kekerasan, yang juga sudah di sosialisasikan sampai di Tingkat Desa. Unit Pelayanan dan Unit Pengaduan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak juga sudah dibentuk sampai di Tingkat Desa namun karena budaya malu dan hal itu merupakan hal yang tabu maka Unit Pengaduan yang sudah dibentuk sejak tahun 2009 itu kurang berfungsi secara optimal.



BAB IX INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Pembangunan Daerah Jangka Menengah Kabupaten Rembang pada dasarnya adalah penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang akan dicapai selama lima tahun, yang penjabarannya dituangkan dalam RPJM daerah Kabupaten Rembang tahun 2016 – 2020. Oleh karena itu perlu ditetapkan target agregat berdasarkan beberapa indikator utama pembangunan dan dirumuskan sebagai tonggak penjur (milesstone) atau sasaran antara yang ingin dicapai pada akhir perencanaan. Target agregat pembangunan Kabupaten Rembang digambarkan dalam beberapa indikator utama, meliputi capaian IPM (indeks Pembangunan Manusia), Indeks Pembangunan Gender (IPG) , Indeks Pemberdayaan Gender (IGD), pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Inflasi.

Besarnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada pada range nilai terendah 40 dan tertinggi 80 yang diperhitungkan berdasarkan empat sub indikator yaitu usia harapan hidup, angka melek huruf , rata-rata lama sekolah pendidikan dan tingkat daya beli masyarakat. Tetapi mulai tahun 2015 penghitungan IPM terjadi perubahan metodologi , hal ini disebabkan beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan seperti angka melek huruf sudah tidak relevan lagi untuk menggambarkan kualitas pendidikan dan PDB perkapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat suatu wilayah.

Pada tahun 2018 untuk menghitung IPM diperlukan indikator angka harapan hidup saat lahir (AHH) , harapan lama sekolah (HLS) , rata-rata lama sekolah (RLS) dan peneluaran per kapita yang disesuaikan.

Besarnya IPM Kabupaten Rembang tahun 2018 termasuk kategori sedang yaitu sebesar 69,46. Angka ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2015 yang hanya mencapai 68,18 meningkat menjadi 68,60 pada tahun 2016, dan meningkat 68,95 pada tahun 2017.



Capaian indikator agregat dan komponen-komponen pembentuknya dapat dilihat dalam tabel berikut ini

Tabel 9.1 Capaian Agregat Kabupaten Rembang Th. 2015 - 2018

No	Indikator	2015	2016	2017	2018
1	2	5	6	7	8
1	Usia Harapan Hidup (tahun)	74,22	74,22	74,32	74,39
2	Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,02	12,03	12,04	12,08
3	Rata-rata lama sekolah (tahun)	6,92	6,93	6,94	6,95
4	Pengeluaran perkapita (ribu Rp)	9.122	9.453	9.736	10191
Indeks Pembangunan Manusi (IPM)		68,18	68,60	68,95	69,46

Sumber data : BPS Kabupaten Rembang

Apabila dibandingkan dengan kabupaten sekitarnya, IPM kabupaten Rembang pada tahun 2018 lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Blora, tetapi lebih rendah dibandingkan Kabupaten Pati . Namun demikian besarnya nilai IPM tersebut masih berada dibawah IPM rata-rata Kabupaten (Jawa Tengah) yang mencapai 71,15 , Sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 9.2 Perbandingan Nilai IPM Kabupaten Rembang Dengan Kabupaten Lain Th. 2015 - 2018

No	Kabupaten dan Propinsi	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
1	Rembang	68,18	68,60	68,95	69,46
2	Pati	68,51	69,03	70,12	70,71
3	Blora	66,22	66,61	67,52	67,95
4	Jawa Tengah	69,49	69,98	70,52	71,15

Sumber data : BPS Kabupaten Rembang



Sementara itu tolok ukur keberhasilan peningkatan kesetaraan gender dihitung berdasarkan IPG (Indeks Pembangunan Gender) dan IDG (Indeks Pemberdayaan Gender). Besarnya nilai IPG paling rendah 40 dan tertinggi 80, dengan sub indikator sama dengan IPM, namun indikator tersebut terpilah antara laki-laki dan perempuan yang meliputi prosentase penduduk laki-laki dan perempuan, jumlah angkatan kerja perempuan, jumlah perempuan yang bekerja di tingkat manajer dan terampil serta keterwakilan perempuan dalam politik.

Besar IPG Kabupaten Rembang pada tahun 2018 mengalami sedikit kenaikan jika dibandingkan pada tahun 2017 yaitu dari 86,18 menjadi 86,49. Sedangkan untuk besar IDG Kabupaten Rembang pada tahun 2014 sampai tahun 2018 mengalami kenaikan. Besarnya nilai IPG dan IDG Kabupaten Rembang selengkapnya dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 9.3 Capaian IPG dan IDG Kabupaten Rembang Th. 2014 - 2018

No	Indeks	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	4	5	6	7	
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	86,04	85,87	--	86,18	86,49
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	66,43	70,35	--	72,45	73,12

-- data tidak tersedia karena tdk ada survei Sakernas 2016

Sumber : Kementerian Pemberdayaan Perempuan tahun 2018

Besarnya IPG Kabupaten Rembang pada tahun 2018 jika dibandingkan dengan kabupaten di sekitarnya diantara Blora dan Pati, sebaliknya untuk IDG Kabupaten Rembang tahun 2018 berada di atas Kabupaten Pati dan Blora, sebagaimana terlihat pada tabel sebagai berikut :



Tabel 9.4 Perbandingan Nilai IPG dan IDG Kabupaten Rembang Dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2014 - 2018

No	Indeks	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	4	5	6	7	
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)					
	Rembang	86,04	85,87	--	86,18	86,49
	Pati	89,99	91,06	--	91,98	91,50
	Blora	82,66	83,54	--	83,55	83,79
	Jawa Tengah	91,89	92,21	--	92,68	91,95
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)					
	Rembang	66,43	70,35	--	72,45	73,12
	Pati	65,95	65,74	--	67,97	66,55
	Blora	67,34	69,94	--	70,52	70,72
	Jawa Tengah	74,46	74,80	--	75,,10	74,03

Sumber : Kementerian Pemberdayaan Perempuan tahun 2018

Pada tahun 2018 besarnya IPG dan IDG Kabupaten Rembang mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya pendidikan kaum perempuan dan meningkatnya pendapatan masyarakat. Hal ini didukung oleh kebijakan dari pemerintah tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan sebagaimana Inpres No, 9 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional yang Berkeadilan yang didalamnya mengamanatkan adanya anggaran yang responsif gender untuk mencapai tujuan pembangunan milenium pada tahun 2020.



BAB X PENUTUP

Tersedianya data berbasis gender di berbagai bidang kehidupan menjadi sangat penting serta lebih bermakna apabila suatu alternatif kebijakan baru akan diambil dalam rangka menuju proses perbaikan sosial yang mengarah pada wawasan gender di suatu wilayah. Perbaikan sosial yang dimaksud adalah tersedianya suatu formulasi kebijakan yang akan memungkinkan mengurangi bias gender dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Berkaitan dengan tersusunya Buku Statistik Gender dan Analisis di Kabupaten Rembang tahun 2008 maka diharapkan analisis tersebut menggugah para pengambil keputusan di daerah ini untuk lebih menerapkan kebijakan yang berwawasan gender, dengan menyetarakan kedudukan perempuan dengan laki-laki di berbagai bidang kehidupan. Jika hal ini akan dilembagakan, sehingga akan terjadi secara berkesinambungan maka pemutakhiran data berbasis gender sangat penting untuk dilakukan.

10.1 Kesimpulan

1. Jumlah penduduk Kabupaten Rembang memperlihatkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun, yaitu pada tahun 2017 dengan pertumbuhan 0,76 % mengalami kenaikan tahun 2018 pertumbuhannya 0,81 %.
2. Komposisi penduduk perempuan empat tahun terakhir menyebutkan jumlahnya lebih besar dari penduduk laki-laki dan ada kecenderungan semakin lebih besar penduduk perempuannya, yang ditunjukkan angka seks ratio yang semakin turun dari tahun ke tahun. Hal inilah yang mendorong suatu kiat untuk selalu memberdayakan perempuan diberbagai bidang kehidupan.



3. Masih didapatkannya usia perkawinan muda (10-16 tahun) untuk perempuan pada tahun 2018 di Kabupaten Rembang sebesar 31 orang.
4. Rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan sebanyak 16,42 persen, sebagian besar mereka berstatus cerai mati dan cerai hidup sebesar 86,72 persen dan yang lain berstatus kawin dan belum kawin 13,26 persen.
5. Bahwa angka partisipasi anak usia SD dan SLTA selama 3 tahun terakhir mengalami kenaikan. Peningkatan ini terjadi karena semakin besarnya komitmen Pemerintah Daerah dalam bidang pendidikan dan kesadaran masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi.
6. Di bidang kesehatan Pemerintah daerah telah berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan baik peningkatan sarana dan prasarana maupun jumlah petugas kesehatan dan persebarannya, namun lokasi daerah sebagian adalah pedesaan dimana akses ke RS atau Puskesmas yang sulit menyebabkan program pelayanan kesehatan agak tersendat, hal ini ditandai dengan Angka kematian bayi yang masih fluktuatif, begitu pula angka kematian ibu. Tahun 2018 AKB sebesar 16,90 dari 1000 kelahiran hidup dan AKI sebesar 9 kasus. Hal ini terkait pula dengan masih tingginya penolong kelahiran oleh bidan sebesar 64,12 persen dan 0,43 persen persalinan yang di bantu oleh dukun.
7. Dalam hal keikutsertaan perempuan dalam program pengendalian penduduk seperti program Keluarga Berencana didapatkan 80,02 persen dari wanita yang pernah mengikuti KB dikatakan sebagai peserta aktif selebihnya 19,98 persen tidak lagi ber KB (drop Out). Di Kabupaten Rembang tahun 2018 didapatkan WUS sejumlah 107.184 orang diantaranya 135.460 orang merupakan PUS, sejumlah inilah yang berpotensi meningkatkan jumlah penduduk dimasa mendatang, sehingga perlu penanganan lebih lanjut.



8. Peran serta perempuan dalam program KB tak diragukan lagi, seperti disebutkan data DINSOSPPKB Kabupaten Rembang peserta KB dengan alat/cara suntik mencapai 50,48 persen, cara susuk 23,73 persen, pasang pil mencapai 16,87 persen, AKDR dan lainnya sebesar 8,91 persen.
9. Angka kecukupan gizi untuk balita ditunjukkan dalam pengukuran yang dilakukan di berbagai posyandu, dinyatakan berstatus gizi buruk sejumlah 48 balita .
10. Dari segi penanggulangan penyakit pada anak-anak telah dilakukan program PIN sebagai ajang pelaksanaan program tersebut, hasilnya cukup menggembirakan, lebih dari 96,54 persen bayi telah imunisasi BCG dan lebih 94,90 persen DPT3 / HB3, untuk Polio dan Campak lebih dari 94,26 persen.
11. Tingginya persentase perempuan dalam angkatan kerja mengindikasikan semakin meningkatnya *double house hold* yang berarti didalam rumah tangga baik suami dan istri bekerja untuk penghasilan keluarga. Angka TPAK perempuan tahun 2018 sebesar 55,24 persen dapat dikatakan sudah cukup tinggi, walaupun masih dibawah TPAK laki-laki sebesar 80,03 persen. Dilihat dari persebaran pekerja perempuan dalam lapangan usaha, perempuan hampir merata di semua sektor walaupun masih sedikit, bahkan pada sektor industri dan perdagangan pekerja perempuan lebih besar dibanding pekerja laki-laki.
12. Di sektor publik peran serta kaum perempuan belum begitu nyata. Hal ini disebabkan kurangnya kesempatan bagi kaum perempuan yang diberikan baik dalam bidang politik, legislatif, yudikatif maupun eksekutif. Secara umum kaum perempuan banyak menempati posisi sebagai fungsional seperti di bidang kesehatan dan pada bidang pendidikan.



13. Kekerasan yang terjadi pada perempuan semakin meningkat kuantitas maupun kualitasnya kadang bersifat terbuka. Data yang tercatat pada unit pelayanan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak Semai RWC3 di tahun 2018 telah terjadi 5 kasus kekerasan terhadap perempuan diantaranya, 3 kasus kekerasan fisik dan 2 kekerasan seksual, sedangkan kekerasan pada anak sebanyak 15 kasus diantaranya 3 kekerasan fisik, 11 pelecehan seksual/pencabulan dan 1 kasus pelantaran

10.2 Saran

1. Peran suatu dinas/instansi dalam penyusunan statistik dan analisis gender masih perlu ditingkatkan, karena dinas/instansi lebih mengetahui sebab terjadinya bias gender.
2. Pembentukan focal point dan pembatasan data pilah di semua SKPD sebagai penyusunan analisis gender.
3. Berdasarkan analisis pada lingkungan dinas/instansi mampu mengusulkan program untuk mengatasi bias gender yang ada.
4. Kebijakan dibidang pendidikan antara lain :
 - a. Perlu adanya dukungan kebijakan Departemen Pendidikan Nasional tentang rasio jumlah SMA dan SMK dan lebih banyak SMK-nya, dengan memberikan kesempatan masyarakat untuk mendirikan SMK dan penambahan unit sekolah baru SMK negeri di beberapa kecamatan;
 - b. Peningkatan jumlah siswa perempuan penerima beasiswa dari keluarga kurang mampu di tingkat SMA/MA/SMK;
 - c. Peningkatan program sekolah gratis pada jenjang Pendidikan Menengah dan program retrieval bagi siswa SLTA, yaitu rekrutmen penduduk usia SLTA yang tidak melanjutkan untuk bersekolah melanjutkan di SLTA;



- d. Pengembangan lifeskill (pendidikan kecakapan hidup) berupa praktek ketrampilan bagi siswa SLTA selain kurikulum wajib.
- 5. Kebijakan dibidang ekonomi
 - a. Penumbuhan usaha ekonomi perempuan dengan memberikan peluang pada akses permodalan;
 - b. Perlindungan pada pekerja khususnya pekerja perempuan.
- 6. Kebijakan di sektor publik
 - a. Pembentukan kaukus perempuan;
 - b. Pendataan dan pembinaan pada organisasi perempuan.
- 7. Kebijakan perlindungan perempuan dan anak, antara lain:
 - a. Pemberian ruang yang aman dan layak bagi pertumbuhan dan perkembangan anak;
 - b. Pembuatan sarana dan prasarana serta aturan yang jelas dalam pelayanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.